

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.47, 2008

DEPARTEMEN KEHUTANAN, KEMENTERIAN. Lembaga. Rencana Kerja.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor: P.54/Menhut-II/2008

TENTANG

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEHUTANAN.

- Menimbang: a. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengamanatkan setiap Kementerian/ Lembaga Negara menyusun Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja-KL) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) atau Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Negara (Renstra-KL);
 - b. bahwa Departemen Kehutanan melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.58/Menhut-II/2006 telah menetapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) Departemen Kehutanan tahun 2005-2009 (penyempurnaan) yang harus dijabarkan dalam rencana tahunan yaitu Renja-KL Departemen Kehutanan tahun 2009;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Rencana

Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2009;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
- 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009;
- 10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
- 11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kehutanan;
- 12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 456/Menhut-VII/2004 tentang Lima Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan Dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu;
- 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan 2006-2025;
- 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.58/Menhut-II/2006 tentang Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009 (penyempurnaan);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG

RENCANA KERJA KEMENTERIAN / LEMBAGA (RENJA-KL) DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN

2009.

Pasal 1

Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2009, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Renja-KL ini merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) seluruh satuan kerja lingkup Departmeen Kehutanan tahun anggaran 2009.

Pasal 3

Renja-KL Departemen Kehutanan Tahun 2009 terdiri dari Pendahuluan, Visi dan Misi, Kemajuan Kegiatan Pembangunan Kehutanan s/d Bulan Desember Tahun 2007, Kebijakan Prioritas Tahun 2005-2009, Sasaran Pembangunan Tahun 2009, dan Penyusunan Renja-KL Tahun 2009.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai tanggal 31 Desember 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2008 MENTERI KEHUTANAN,

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Lampiran

Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor : P.54/Menhut-II/2008 Tanggal : 19 September 2008

TENTANG

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN 2009

JAKARTA, SEPTEMBER 2008

I. PENDAHULUAN

Agenda Nasional tahun 2004 - 2009 Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) terdiri atas : 1) mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, dengan fokus penanganan penyelesaian masalah konflik horizontal, penanggulangan terorisme, dan penanggulangan aktivitas illegal; 2) mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, dengan fokus penanganan penguatan Institusi Kejaksaan Agung, penyelesaian kasus-kasus korupsi, dan melanjutkan reformasi birokrasi; 3) mewujudkan Indonesia yang sejahtera, dengan fokus penanganan perbaikan iklim investasi, menjaga stabilitas ekonomi makro, dan penanggulangan kemiskinan.

Adapun Agenda Nasional yang berkaitan secara langsung dengan kehutanan adalah: 1) mewujudkan Indonesia yang aman dan damai dengan fokus penanganan penanggulangan aktivitas ilegal di bidang kehutanan, antara lain pemberantasan pencurian kayu, perdagangan satwa liar, perambahan kawasan hutan; 2) mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera dengan fokus penanganan perbaikan pelayanan umum dan ketataprajaan yang baik, iklim investasi, menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dengan menggerakkan sektor riil dan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan, perlindungan konservasi sumber daya alam, serta rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam.

Untuk melaksanakan agenda nasional, Departemen Kehutanan telah menetapkan visi pembangunan kehutanan, yakni "Terwujudnya penyelenggaraan kehutanan untuk menjamin kelestarian hutan dan peningkatan kemakmuran rakyat". Misi yang ditetapkan meliputi: 1) menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional; 2) mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan yang meliputi fungsi konservasi, lindung dan produksi kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan untuk mencapai manfaat lingkungan sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari; 3) meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS); 4) mendorong peranserta masyarakat; 5) menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan; dan 6) memantapkan koordinasi antara Pusat dan Daerah.

Selanjutnya untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah tersebut Departemen Kehutanan menetapkan Lima Kebijakan Prioritas 2005-2009 melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.456/Menhut-VII/2004 tentang Lima Kebijakan Prioritas yang isinya: 1) pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu ilegal; 2) revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan; 3) rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan; 4) pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan; dan 5) pemantapan kawasan hutan.

Kebijakan tersebut didasari oleh kehendak Departemen Kehutanan untuk tetap mementingkan perlindungan pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati (SDAH) secara lestari yang tidak mengurangi kontribusi kehutanan terhadap perekonomian Nasional, terutama pengembangan ekonomi skala pedesaan.

Langkah ini diharapkan selain meningkatkan peran produksi hasil hutan bukan kayu (Non Timber Forest Product/NTFP) dan jasa lingkungan juga dapat mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan usaha kecil sektor kehutanan terutama yang berada di sekitar hutan.

Sebagai arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan kehutanan, lima kebijakan prioritas tersebut dilaksanakan melalui fokus-fokus kegiatan, diantaranya pengembangan hutan tanaman, pengembangan hutan rakyat, restrukturisasi industri kehutanan, pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (non timber forest product/NTFP), pengembangan jasa lingkungan dan wisata alam, rehabilitasi hutan dan lahan, serta peningkatan kinerja pengelolaan hutan alam dan hutan tanaman, disamping tetap melaksanakan perlindungan dan konservasi sumber daya alam, serta rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya hutan. Sedangkan dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat khususnya yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan, pendekatan pengelolaan hutan diselenggarakan melalui pola pemberdayaan masyarakat, dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan kehutanan.

Pembangunan kehutanan tahun 2009 dituangkan dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) Departemen Kehutanan tahun 2009 dan merupakan penjabaran Renstra-KL Departemen Kehutanan tahun 2005-2009 dalam bentuk rencana tahunan Departemen Kehutanan.

Renja-KL Departemen Kehutanan tahun 2009 juga sudah terintegrasi dengan Kebijakan Prioritas Departemen Kehutanan, Renstra Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009 (Penyempurnaan), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2009, mengingat dalam penyusunan Renja KL tersebut dilakukan pengelompokan kegiatan berdasarkan unsur-unsur kebijakan prioritas, sasaran dan indikator strategis, program penganggaran, serta tetap memperhatikan kegiatan-kegiatan pokok yang telah ditetapkan. Selanjutnya Renja-KL ini merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) seluruh satuan kerja lingkup Departemen Kehutanan tahun anggaran 2009. Dari format integrasi ini, Renja-KL juga dapat digunakan sebagai pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan sebagaimana diamanatkan dalam PP No.39 tahun 2006 dan acuan evaluasi kebijakan prioritas, evaluasi kinerja, evaluasi kegiatan dan evaluasi program.

II. VISI DAN MISI

Sesuai dengan Renstra-KL Departemen Kehutanan tahun 2005-2009 (Penyempurnaan), Visi dan Misi Departemen Kehutanan merupakan penjabaran mandat sektor kehutanan yang tertuang dalam Undang Undang (UU) No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU lainnya yang berkaitan dengan kehutanan.

VISI

"Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan Untuk Menjamin Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat".

Adapun sasaran strategis pencapaian visi jangka menengah Departemen Kehutanan (2005-2009) sebagai berikut:

- Tercapainya desentralisasi pembangunan kehutanan yang didukung oleh stakeholders dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pelestarian sumber daya hutan;
- 2. Pemberantasan pencurian kayu dan perdagangan kayu illegal ;
- 3. Penerapan prinsip pengelolaan hutan lestari antara lain dengan membangun minimal 1 (satu) unit pengelolaan hutan di setiap Provinsi ;
- 4. Penambahan pembangunan hutan tanaman sehingga mencapai seluas 5 juta ha dan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 5 juta ha ;
- 5. Pembentukan 21 unit Taman Nasional model;
- 6. Revitalisasi dan pengembangan hutan rakyat terutama diluar pulau Jawa ;
- 7. Revitalisasi 282 DAS prioritas agar berfungsi secara optimal;
- Pengembangan aneka usaha kehutanan non kayu dan jasa lingkungan secara komersial;
- 9. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 3–10 % dan pendapatan masyarakat di dalam dan sekitar hutan sebesar 3-4 % per tahun ;
- 10. Pengukuhan kawasan hutan seluas 12 juta ha;

MISI

- 1. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- 2. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan yang meliputi fungsi konservasi, lindung dan produksi untuk mencapai manfaat lingkungan sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari;
- 3. Meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS);
- 4. Mendorong peran serta masyarakat;
- 5. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan;
- 6. Memantapkan koordinasi Pusat dan Daerah dalam pembangunan kehutanan.

III. KEMAJUAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER TAHUN 2007

Pelaksanaan pembangunan kehutanan dimaksudkan untuk mensukseskan agenda nasional Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) yang diselenggarakan sesuai prinsip-prinsip good governance dan clean government. Prinsip tersebut diwujudkan melalui penguatan pengawasan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Dalam penerapannya, Departemen Kehutanan memperhatikan proses desentralisasi yang dibarengi proses debirokratisasi dan deregulasi, serta peningkatan kerjasama antar sektor, Pusat dan Daerah, para pihak dan kerjasama luar negeri.

Kemajuan pelaksanaan kegiatan pembangunan sampai dengan bulan Desember 2007 merupakan realisasi dari implementasi Lima Kebijakan Prioritas Departemen Kehutanan nomor SK.456/Menhut/2004 yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan Menteri Kehutanan No. 7501/Kpts-II/2002 tanggal 7 Agustus 2002. Realisasi tersebut terlihat pada pencapaian sasaran dari kebijakan prioritas yang telah ditetapkan, seperti diuraikan sebagai berikut:

A. Pemberantasan Pencurian Kayu di Hutan Negara dan Perdagangan Kayu Hegal

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam usaha pengamanan kawasan hutan adalah sebagai berikut:

- Operasi pengamanan hutan sebanyak 365 kali.
- 2. Penyelesaian 383 kasus pencurian kayu di dalam hutan negara.
- 3. Pembentukan Pamhut Swakarsa di 30 lokasi.
- Penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan hutan, berupa : Rekruitmen anggota SPORC sebanyak 300 orang; Penyegaran Polhut 120 orang; Diklat Polhut dan PPNS, 60 Orang PPNS dan 60 orang ABK serta 30 orang SPORC; Gelar pasukan 120 orang.
- 5. Penyempurnaan/ penguatan kebijakan dan peraturan perundangan.
- Menggalang kerjasama dengan negara-negara konsumen kayu serta LSM nasional dan internasional dalam pemberantasan pencurian kayu dan perdagangan kayu illegal.

B. Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan

Implementasi kebijakan Revitalisasi Sektor Kehutanan Khususnya Industri Kehutanan dijabarkan kedalam empat fokus kegiatan yaitu: pengelolaan pemanfaatan hutan produksi alam, pengelolaan pemanfaatan hutan tanaman, pengelolaan hutan yang tidak dibebani hak/izin pemanfaatan, dan restrukturisasi industri primer kehutanan.

Fokus kegiatan pengelolaan pemanfaatan hutan produksi alam bertujuan untuk meningkatan kinerja pemegang IUPHHK-HA (HPH) dalam rangka menuju sistem pengelolaan hutan produksi lestari yang berorientasi pada keseimbangan produksi, lingkungan dan sosial. Buruknya kinerja IUPHHK-HA tentu sangat merugikan pemerintah dan publik, mengingat institusi pengelolaan hutan alam dengan skema IUPHHK-HA memposisikan pemerintah sebagai pemilik sumberdaya hutan dan pemegang ijin sebagai penyewa. Sebagai pemilik sumberdaya, pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur pelaksanaan pengusahaan hutan yang sesungguhnya telah dilakukan cukup hati-hati.

Jumlah HPH/IUPHHK-HA per Bulan Desember 2006 sebanyak 322 unit dengan luas 28.778.923 ha (data strategis kehutanan, 2007) dan pada Bulan Desember 2007 sebanyak 324 unit seluas 28.271.043 ha, sehingga terdapat kenaikan jumlah unit HPH/IUPHHK-HA sebanyak 2 Unit (0,62%) namun terjadi penurunan luas HPH/IUPHHK-HA sebanyak 507.880 ha (2,1%). Jumlah HPH yang telah dicabut sejak tahun 2004 sampai dengan 2006 adalah sebanyak 26 unit dengan luas sebesar 2.226.148 ha dan jumlah HPH yang telah dicabut pada tahun 2007 sebanyak 10 unit dengan luas sebesar 1.631.884 ha sehingga total luas HPH yang dicabut seluas 3.858.032 ha. Jumlah investasi kumulatif

sampai dengan Bulan Desember 2006 sebanyak Rp. Rp. 14.779.780.708.887 dan per Desember 2007 menjadi Rp. 17.307.758.120.291 atau mengalami kenaikan sebesar 17,10 %.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam usaha pengelolaan pemanfaatan hutan produksi alam pada tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- 1. Pembinaan dan pengendalian produksi hasil hutan sebanyak 160 unit manajemen.
- 2. Pembinaan dan pengendalian kelola lingkungan 160 unit manajemen.
- 3. Pembinaan dan pengendalian kelola sosial 160 unit manajemen.
- 4. Penilaian kinerja usaha pemanfataan hutan produksi alam 25 unit manajemen.
- 5. Pelaksaanaan silvikultur intesif 160 unit manajemen.
- 6. Pembangunan model unit manajemen hutan meranti pada 4 lokasi.

Saat ini kebutuhan kayu untuk memasok industri perkayuan di Indonesia sudah tidak mungkin lagi mengandalkan dari hutan alam. Untuk itu perlu dicari alternatif sumber bahan baku lain, tanpa harus menambah luas konversi hutan alam. Sudah saatnya sekarang pemerintah menggerakkan pemanfaatan dan pengelolaan hutan tanaman untuk mengatasi kekurangan bahan baku kayu tersebut. Realisasi luas penanaman HTI untuk tahun 2006 mencapai 215.679,95 Ha. Sehingga realisasi luas tanaman HTI secara komulatif sampai dengan tahun 2006 adalah 3.079.083,28 Ha. Sedangkan penyerapan tenaga kerja sampai dengan tahun 2006 adalah ± 150.000 orang. Jumlah investasi kumulatif sampai dengan Bulan Desember 2006 sebanyak Rp. 13.983.145.521.310 dan per Desember 2007 menjadi Rp. 14.610.545.605.745 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 627.400.084.435 (5%).

Jumlah HPHTI/IUPHHK-HT per Bulan Desember 2006 sebanyak 228 unit (luas 9.568.308 ha) terdiri dari SK HPHTI definitif sebanyak 129 unit (luas 6.171.144 ha), SK Sementara HPHTI-Transmigrasi sebanyak 33 unit (luas 638.675 ha), Surat Menhut Pencadangan HTI sebanyak 66 unit (luas 2.758.489 ha). Pada Bulan Desember 2007, HPHTI/IUPHHK-HT berjumlah 247 unit (luas 9.883.499 ha) atau naik 19 unit (8,33%) dibanding Bulan Desember 2006. Adapun SK HPHTI Definitif naik menjadi 163 unit (luas 7.118.990 ha) atau naik 26,36 %, dan Pencadangan turun 14 unit (26,92%) menjadi 52 unit (luas 2.130.834 ha), sedangkan SK Sementara HPHTI-turun 1 unit (3,03%) menjadi 32 unit (luas 633.675 ha). Jumlah HPHTI yang dicabut sejak tahun 2004 sampai dengan Bulan Desember 2007 sebanyak 5 unit dengan luas 123.100 ha, dengan perincian dicabut pada tahun 2004 sebanyak 3 unit (luas 96.000 ha), tahun 2005 tidak ada HPHTI yang dicabut, dan pencabutan pada tahun 2006 sebanyak 2 unit (luas 27.100 ha). Progres penyelesaian lelang IUPHHK-HT per bulan Desember 2007 sebanyak 9 unit dengan luas 331.372 ha, yang mana batas waktu penyelesaian kewajiban sampai tanggal 14 November 2007 sebanyak 2 unit telah menyelesaikan kewajiban rekomendasi Bupati/Gubernur. Adapun sisanya sebanyak 7 unit, sampai dengan Juni 2008 mengajukan perpanjangan penyelesaian kewajiban, namun ditolak.

Pada saat ini terdapat sekitar 20 juta ha kawasan hutan yang tidak dibebani hak berupa tanah kosong, semak belukar, hutan tidak produktif serta daerah bekas penebangan (LOA). Areal-areal yang tidak dibebani hak tersebut saat ini banyak yang dimanfaatkan tanpa disertai keabsahan kegiatan pemanfaatan yang memadai.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2007 dalam usaha pengelolaan kawasan hutan yang tidak dibebani hak adalah sebagai berikut:

- 1. Penataan pemanfaatan hutan produksi dilakukan melalui kegiatan-kegiatan:
 - Identifikasi dan pemetaan kawasan HP yg tidak dibebani hak.
 - Penyusunan site plan PHP di 3 Provinsi.
 - Penyusunan rencana pemanfaatan areal eks HPH u/ HHBK di 4 Provinsi.
 - Penyelenggaraan GIS 1 Paket.
 - Updating data spasial IUPHHK HA/HT 1 Paket.
 - Penyusunan rencana penataan pemanfaatan areal eks HPH/HPHTI 8 Unit.
 - Biaya administrasi dan sosialisasi penataan areal eks HPH/HPHTI 5 Unit.

- Perencanaan dan pemantapan pemanfaatan HP (HTR) 1 paket.
- Pengadaan GPS 3 Unit.
- Pengendalian pengamanan areal eks HPH/HPHTI 1 paket.
- 2. Penyiapan/pelelangan unit kelola usaha pemanfaatan hasil hutan dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - Penyiapan areal calon IUPHHK-HA/HT seluas 3 juta Ha yang tersebar di 12 Provinsi.
 - Konsultasi publik hasil penilaian lapangan rencana IUPHHK 12 paket.
 - Monitoring dan verifikasi terhadap izin-izin Bupati/Gubernur di 32 Provinsi.
 - Penyusunan data base progres IUPHHK HA/HT 1 paket.
 - Biaya administrasi pelelangan dan pengendalian pekerjaan 1 paket.
- 3. Pembinaan rencana kerja unit kelola usaha pemanfaatan hasil hutan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - Monev pelaksanaan penetapan JPT 1 paket.
 - Penilaian dan pembinaan pembuatan Rencana Kerja IUPHHK (RKT-RKL) 1 paket.
 - Sosialisasi kebijakan pemanfaatan Hutan Produksi 1 paket.
- 4. Pembinaan kapasitas kelembagaan dan investasi unit kelola usaha pemanfaatan hasil hutan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - Pembinaan dan monitoring perkembangan kelembagaan/ kemitraan dan usaha IUPHHK 1 paket.
 - Kajian pertumbuhan investasi kehutanan dan kebijakan pelestarian hutan 1 paket.
 - Penyusunan standar, kriteria dan indikator peran serta UKM pada IUPHHK 1 paket.

Ijin Industri sampai dengan Bulan Desember 2007 tercatat sebanyak 9 ijin dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 9.930 orang dan investasi sebesar Rp. 611.599.530.305,-. Sampai dengan Bulan Oktober 2007 rencana pemenuhan bahan baku industri primer hasil hutan kayu dengn kapasitas izin produksi sampai dengan 6.000m³/tahun yang meliputi industri kayu lapis dan Laminated Veneer Lumber (LVL), veneer, penggergajian kayu, serpih kayu dan pulp sebesar 44.987.472,39 m³ dengan perincian sebagai berikut :

- Stock Awal : 4.045.244,38 m³
- IUPHHK Hutan Alam : 6.042.937,84 m³
- IUPHHK Hutan Tanaman : 31.666.596,30 m³
- Hutan Rakyat : 1.308.847,73 m³
- Perum Perhutani : 40.024,26 m³
- Izin Lainnya yang Sah/IPK : 1.232.212,18 m³
- Perkebunan : 368.456,27 m³
- Impor : 240.978,36 m³
- Lelang : 2.583,62 m³
- IPHHK Lain : 39.592,55 m³

Adapun realisasi pemenuhan bahan baku industri primer hasil hutan kayu kapasitas ijin produksi di atas 6.000m³/tahun sampai dengan bulan Desember 2007 adalah sebesar 36.387.235,30 m³, dengan rincian sebagai berikut :

- Stock Awal : 3.898.618,16 m³
- IUPHHK Hutan Alam : 6.437.684,54 m³
- IUPHHK Hutan Tanaman : 20.614.208,77 m³
- Land clearing IUPHHK-HT : 3.063.606,87 m³
- Hutan Rakyat : 611.990,81 m³
- Perum Perhutani : 48.033,60 m³
- Izin Lainnya yang Sah/IPK : 1.328.050,18 m³
- Perkebunan : 93.471,34 m³
- Impor : 104.431,31 m³

- Lelang : 32.553,83 m³ - IPHHK Lain : 154.585,91 m³

Sebagai salah satu upaya yang perlu dilakukan pemerintah untuk menyehatkan dan membangkitkan kembali industri perkayuan di Indonesia adalah melalui restrukturisasi industri pengolahan kayu primer. Restrukturisasi diarahkan untuk mencapai kondisi: terciptanya struktur industri yang efisien bahan baku, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan nilai tambah yang tinggi.

C. Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan.

Implementasi kebijakan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan dijabarkan ke dalam enam fokus kegiatan, yaitu: Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pengelolaan DAS, Pengendalian Kebakaran Hutan, Pengelolaan Kawasan Konservasi (Suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam/ Taman Buru dan Hutan Lindung), Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Produk Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL), dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan.

Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan dalam mendukung sistem penyangga kehidupan daerah aliran sungai. Menurut UU No. 41/1999, pasal 41 (1) dan PP No. 35/ 2002 pasal 17 (1) kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam usaha Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- Penyelesaian penyusunan PP tentang Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Reklamasi Hutan.
 - Pembahasan inter Departemen Kehutanan tentang RPP RHL.
 - Sosialisasi pedoman teknis RHL sumber dana DBH-DR.
 - Penyusunan pedoman rancangan teknis reboisasi.
 - Penyusunan pedoman pemanfaatan hasil rehabilitasi.
 - Penyusunan Kriteria-Standar keberhasilan Reboisasi.
- 2. Penyempurnaan RUU Konservasi Tanah
 - Pembahasan Draft RUU Konservasi Tanah.
- 3. Penyempurnaan Kepmenhut/Permenhut RHL dan Perbenihan Tanaman Hutan
 - Pembahasan Draft Perpres tentang penyelenggaraan gerhan.
 - Permenhut tentang Gerhan 2006 dan Permenhut Penyelenggaraan, Pedoman dan Juklak Gerhan 2007.
- 4. Pengembangan kapasitas kelembagaan
 - Penyiapan Organisasi 2 satker BP. Mangrove.
 - Sosialisasi pedoman identifikasi paket teknologi RLKT 10 BP DAS.
 - Penyiapan Bahan Informasi RHL (leaflet).
 - Lokakarya aplikasi sistem insentif reboisasi.
 - Pelatihan aplikasi paket teknologi RLKT untuk BPDAS.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan/GERHAN

Pengadaan bibit GN-RHL/Gerhan sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 adalah sebanyak 960.627.167 batang yang terdiri dari jenis Kayu-kayuan dan jenis MPTS (*Multi Purpose Tree Species*). Sampai saat ini realisasi fisik GERHAN tahun 2007 telah mencapai 86,56 % sekitar 779.060 ha dari rencana 900.000 ha

6. Pengembangan Perbenihan

- Tersusun Peraturan Dirjen RLPS tentangg perbenihan tanaman hutan.
- Perdirjen tentang Norma, kriteria-standar dan prosedur pengembangan usaha perbenihan dan pembibitan tanaman hutan.
- Rancangan SIM Perbenihan.

Selain kondisi lapangan yang menyebabkan gagalnya program RHL yang menyebabkan luasnya lahan kritis dan DAS kritis, situasi dan kondisi yang mempengaruhi efektifitas pengelolaan DAS adalah belum terpadunya tujuan pengelolaan sumberdaya alam di suatu DAS baik antar sektor maupun politik pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten). Pengelolaan DAS merupakan suatu instrumen penting dalam mendorong percepatan RHL dan konservasi sumberdaya hutan. Kegiatan yang telah dalam usaha pengelolaan DAS adalah sebagai berikut:

- 1. Penyusunan, penyempurnaan dan sosialisasi peraturan perundangan.
 - Tersusunnya Draft RPP Pengelolaan DAS Terpadu.
 - Tersusunnya pedoman pemantauan tata air DAS dengan model hidrologi.
 - Tersusunnya pedoman pembinaan proyek-proyek Pengelolaan DAS berbantuan luar negeri.
 - Tersusunnya pedoman pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS.
- 2. Penyusunan rencana dan evaluasi pengelolaan DAS prioritas.
 - Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS di 31 daerah.
 - Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS kerjasama luar negeri, 10 Provinsi.
 - Tersusunnya buku informasi umum DAS Prioritas Pulau Jawa dan Sumatera (DAS/Sub DAS).
 - Tersusunnya peta dan buku lahan kritis nasional.
- 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan RHL/DAS.
 - Terlaksananya kesekretariatan kelembagaan unit ASOCON.
 - Terlaksananya kesekretariatan fokal point UNCD.
 - Pembinaan dan koordinasi forum DAS, 19 Provinsi.
 - Pelatihan teknis review penetapan urutan DAS Prioritas.
 - Terselenggaranya fasilitasi kelembagaan DAS dalam pelaksanaan sosial forestry.

Kebakaran hutan terjadi akibat resultante dari berbagai faktor internal dan eksternal pengelolaan hutan. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terutama dikaitkan dengan praktek pembukaan atau penyiapan lahan dan hutan merupakan salah satu penyebab sering terjadinya kebakaran hutan. Perangkat hukum dan peraturan perundangan serta praktek penegakan hukum yang masih lemah dan tidak menimbulkan efek jera merupakan faktor pendukung penyebab terjadinya kebakaran hutan. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam usaha pengendalian kebakaran hutan pada tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Operasi pemadaman kebakaran

- Kegiatan pemadaman oleh anggota Manggala Agni seluas 2.780,6 Ha.
- Pemadaman dengan water bombing dengan 8 helikopter.
- Identifikasi areal bekas kebakaran di 5 Provinsi.
- Monitoring perkembangan areal bekas kebakaran, 5 lokasi.
- 2. Kampanye pencegahan Kebakaran Hutan
- 3. Patroli pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan di 8 provinsi.
- 4. Pemantauan dan diseminasi hot spot harian, 20 Provinsi.

- 5. Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA), 3100 orang.
- 6. Pembentukan regu Brigdalkarhut BKSDA dan TN, 20 regu.
- 7. Pelatihan dan pendampingan terhadap kelompok swakarsa.

Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap DAS, dan atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat. Luas kawasan hutan yg harus dipertahankan minimal 30% dari luas DAS dan atau pulau dengan sebaran yg proporsional. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam usaha konservasi sumberdaya hutan pada tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan TN Model

- Evaluasi efektivitas pengelolaan 12 TN Model.
- Pembinaan pengelolaan TN Model di 16 lokasi.

2. Pengelolaan KSA/KPA/TB

- Evaluasi pengukuhan 5 KK.
- Evaluasi penetapan zona/ blok 16 KK darat dan 6 KK perairan.
- Evaluasi kerjasama pengelolaan LBKLEE 15 lokasi.
- Evaluasi kolaborasi pengelolaan 5 lokasi.
- Evaluasi pengembangan daerah penyangga 10 lokasi.
- Evaluasi pelaksanaan rehabilitasi di KSA dan HL 14 lokasi.
- Evaluasi efektifitas pengelolaan TWA, Tahura, TB 4 lokasi.
- Evaluasi pelaks. izin pinjam pakai KSA/ KPA 14 lokasi.
- Evaluasi penyelesaian tumpang tindih KK 10 lokasi.
- Evaluasi kondisi kawasan TWA, Tahura, Taman Buru.
- Evaluasi pengelolaan world heritage site/ cagar biosfer 5 lokasi.
- Evaluasi pengelolaan calon lokasi ramsar 3 lokasi.
- Evaluasi kearsipan KK, TB, Wardun, Kolaborasi KPA 8 lokasi.
- Asistensi penyelesaian & penyusunan RP 40 lokasi
- Asistensi penyusunan/ review penataan zona/ blok TWA 5 lokasi
- Asistensi pedoman penataan zona KK perairan 5 lokasi
- Asistensi inventarisasi ekosistem esensial 5 lokasi
- Asistensi pengelolaan KSA/KPA di 8 lokasi
- Asistensi pengelolaan 10 TN baru
- Pemantapan manajemen data & informasi KSDA 17 kegiatan
- Penyelesaian kerjasama pengelolaan KK 20 lokasi
- Penyelesaian masalah keg. non-kehutanan di KK 20 lokasi

3. Pengelolaan Hutan Lindung

- Money pelaksanaan rehabilitasi HL di 14 lokasi.
- Penerbitan buku informasi KSA & HL Jilid II.
- Penyusunan Pedoman Penataan Blok Pengelolaan Hutan Lindung.
- Pembinaan optimalisasi pengelolaan HL 10 lokasi .

D. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Dalam dan Sekitar Kawasan Hutan.

Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan harga tawar kelompok masyarakat yang tidak mempunyai kekuasaan agar mereka dapat mengambil bagian dalam proses-proses pengambilan keputusan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan secara lestari untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka. Kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan, implementasi kegiatannya dijabarkan kedalam tiga fokus kegiatan, yaitu: pengembangan hutan rakyat, pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan pengembangan hutan kemasyarakatan (Hkm).

Pengelolaan hutan rakyat khususnya di Jawa sudah sejak lama berkontribusi secara signifikan terhadap suplai bahan baku industri kayu skala kecil, menengah maupun besar; menciptakan lapangan kerja dan usaha; dan pengurangan tingkat pengangguran. Dalam keterbatasan kemampuan pemerintah untuk memperbaiki produktifitas hutan dan lahan, peran pembangunan hutan rakyat perlu dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan HTR direncanakan pada areal seluas 5,4 juta Ha selama 4 tahun (2007 s/d 2010) dengan perkiraan penyerapan tenaga kerja 93.000 KK/tahun atau setara dengan 360.000 KK dalam 5 tahun dgn investasi Rp.43,2 triliun

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam usaha pengembangan hutan rakyat adalah sebagai berikut:

- 1. Penyusunan pedoman model hutan rakyat kemitraan.
- 2. Penyusunan pedoman inventarisasi dan identifikasi potensi pengembangan hutan rakyat.
- 3. Penyusunan pedoman penguatan kelembagaan kelompok tani HR kemitraan.
- 4. Sosialisasi peraturan Hutan Rakyat di 32 provinsi.
- 5. Pembinaan Hutan Rakyat di 15 provinsi.
- 6. Identifikasi dan inventarisasi potensi pengembangan HR, 32 provinsi.
- 7. Temu usaha Hutan Rakyat kemitraan, 32 provinsi.
- 8. Pelatihan penguatan kelembagaan kelompok tani HR Kemitraan, 400 angkatan.
- 9. Pendampingan Kelompok Tani HR Kemitraan, 400 unit.
- 10. Pembinaan HR Kemitraan, 400 unit.
- 11. Penyusunan rancangan pembangunan Model HR Kemitraan, 30 rancangan.
- 12. Pembangunan Model HR Kemitraan, 6000 ha 30 unit.
- 13. Pendampingan Model HR Kemitraan, 30 unit.
- 14. Pembinaan Model HR Kemitraan, 30 unit.
- 15. Money Model HR Kemitraan, 30 unit.

Sebagai sumberdaya alam yang dapat diperbaharui dan tumbuh secara alami di hutan alam, hasil hutan bukan kayu (HHBK) merupakan sumberdaya potensial yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat dan dapat dikembangkan untuk mendukung program pembangunan kehutanan, khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun kegiatan yang harus dilakukan pada fokus pengembangan hasil hutan bukan kayu adalah:

- 1. Membentuk unit kerja pengurusan HHBK dan mendorong pembentukan unit kerja pengelolaan HHBK.
- 2. Pemberian kepastian hak dan akses atas pemungutan/pemanfaatan HHBK.
- 3. Penguatan kelembagaan petani HHBK.
- 4. Pengembangan kemitraan antara petani HHBK dengan industri pengolah HHBK.
- 5. Mendorong pengembangan industri pengolahan HHBK skala kecil di pedesaan.
- 6. Fasilitasi pengembangan sistem infomasi pasar hasil HHBK.

Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara (HL, HP dan HK kecuali cagar alam, dan zona inti taman nasional) yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Melalui HKm, masyarakat dapat memperoleh hak pemanfaatan hutan selama jangka waktu 35 tahun. Dalam memberdayakan masyarakat melalui HKm, pemerintah kabupaten/kota memberikan fasilitasi pengembangan kelembagaan, bimbingan perencanaan, pengembangan usaha, bimbingan teknologi, pendidikan dan latihan, dan akses terhadap pasar. Model hutan kemasyarakatan dalam rangka Rehabilitasi Hutan merupakan bahan acuan atau wadah pembelajaran dan alat elaborasi terhadap pelaksanaan kebijakan hutan kemasyarakatan secara lebih luas.

Dalam rangka RHL telah dikembangkan HKm dan Social Forestry di 22 provinsi seluas 493.417 ha yang meliputi :

- 1. Areal Usulan Penetapan Wilayah Hutan Kemasyarakatan seluas 168.008,91 ha.
- 2. Areal Pembangunan Hutan Kemasyarakatan seluas 208.327 ha.
- 3. Areal Kerja Social Forestry seluas 55.420 ha.

- 4. Areal yang sudah diberikan izin sementara seluas 62.357ha.
- 5. Telah terbentuk 519 kelompok masyarakat.

E. Pemantapan kawasan hutan

Kebijakan Pemantapan Kawasan Hutan merupakan kebijakan yang diharapkan mampu meletakkan fondasi pengelolaan hutan berupa kepastian areal dan hak yang lebih jelas yang dibutuhkan oleh semua pelaku pengelolaan hutan di Indonesia. Implementasi kebijakan pemantapan kawasan hutan dijabarkan ke dalam tiga fokus kegiatan, yaitu: pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pengembangan informasi sumberdaya hutan, dan pembangunan wilayah pengelolaan kawasan hutan.

Kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan merupakan kegiatan yang sangat erat kaitannya dengan kepastian kawasan hutan secara administrasi maupun fisik di lapangan. Kegiatan ini mempunyai arti sangat penting dan sebagai dasar pijakan kegiatan-kegiatan kehutanan lainnya seperti kegiatan pengurusan hutan pada umumnya dan khususnya kegiatan pengelolaan hutan.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam usaha pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan pada tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- 1. Penunjukan kawasan hutan.
 - Penyelesaian/penyediaan bahan penunjukan kawasan hutan parsial termasuk KHDTK di 30 lokasi.
 - Paduserasi antara RTRWP dengan TGHK di 3 Provinsi.
 - Paduserasi antara RTRWP dengan penunjukan kawasan hutan provinsi yang melakukan review di 7 provinsi.
- 2. Pengembangan sistem informasi pengukuhan kawasan hutan.
 - Input dan updating data spasial dan non spasial penunjukan dan batas kawasan hutan.
 - Pembuatan database pengukuhan kawasan hutan di 11 lokasi .
 - Penelusuran,inventarisasi dan penataan dokumen pengukuhan kawasan hutan di 12 lokasi.
- 3. Penataan batas kawasan hutan.
 - Penataan batas kawasan hutan sepanjang 4605 km.
 - Penyelesaian/perbaikan BATB kawasan hutan di 75 lokasi.
- 4. Penyelesaian penetapan kawasan hutan.
 - Penyelesaian/penyediaan bahan penetapan kawasan hutan yang sudah ditata batas temu gelang seluas 2 juta ha.
- 5. Sosialisasi SK dan peta penetapan kawasan hutan di 11 BPKH; Penyesuaian peraturan dan pedoman penggunaan kawasan hutan; Penyiapan pertimbangan teknis penggunaan kawasan hutan sebanyak 30 unit; Monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan di 10 lokasi; Penyelesaian lahan kompensasi penggunaan kawasan hutan sebanyak 8 unit; Penyelesaian masalah penggunaan kawasan hutan di 15 lokasi; Pengkajian terpadu dalam rangka permohonan penggunaan kawasan hutan di 2 lokasi; Pengkajian terpadu terhadap usulan perubahan peruntukan kawasan hutan di 5 lokasi; Koordinasi masalah pertanahan dalam kawasan hutan di 10 lokasi.
- 6. Monitoring dan evaluasi pelepasan dan/atau TMKH (Tukar Menukar Kawasan Hutan).
 - Monitoring dan evaluasi pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sebanyak 30 lokasi.
 - Monitoring dan evaluasi TMKH di 30 lokasi.

- 7. Melakukan koordinasi pencabutan SK pelepasan kawasan hutan di 15 provinsi.
- 8. Pengkajian penyelesaian permasalahan pelepasan kawasan hutan untuk transmigrasi di 28 lokasi.
- 9. Pengkajian terpadu dalam rangka usulan perubahan fungsi kawasan hutan sebanyak 5 lokasi.
- 10. Evaluasi fungsi kawasan hutan di 5 lokasi.
- 11. Sosialisasi dan sinkronisasi data mutasi kawasan hutan di 20 provinsi.

F. Kebijakan pendukung

- 1. Penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 2. Pengembangan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan kehutanan regional.
- 3. Pengembangan ketatausahaan pemerintah dan pengelolaan sarana dan prasarana Dephut.
- 4. Pengembangan Perencanaan dan Administrasi Keuangan.
- 5. Pembinaan Hukum Perundang-undangan Kehutanan.
- 6. Penelitian dan pengembangan IPTEK.
- 7. Pengkajian dan Penerapan Hasil Litbang.
- 8. Pengembangan SDM dan kelembagaan.
- 9. Penyelenggaraan kepegawaian.
- 10. Kerjasama kemitraan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan LH serta penerapan konvensi internasional.
- 11. Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri dan Investasi bidang Kehutanan.
- 12. Penyelenggaraan Standardisasi dan Lingkungan Kehutanan.
- 13. Penyusunan Rencana Kehutanan.
- 14. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kehutanan.
- 15. Sosialisasi, pelaksanaan, dan pemantauan berbagai perjanjian internasional baik di tingkat Pusat maupun Daerah.

IV. KEBIJAKAN PRIORITAS TAHUN 2005-2009

Sumberdaya hutan merupakan sumberdaya strategis yang mempunyai manfaat nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa, baik sebagai manfaat ekonomi, sosial maupun lingkungan. Keragaman manfaat hutan yang tinggi, dalam pemanfatan dan pengelolaannya haruslah dilaksanakan secara bijaksana. Pemanfaatan sumberdaya harus selalu mempertimbangkan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan yang seimbang, dinamis dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di luar sektor kehutanan, baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Untuk tetap menjaga kelestarian hutan dan manfaatnya, maka perlu dikelola melalui manajemen hutan terpadu. Dalam kegiatan manajemen tersebut tentunya terdapat tahapan kegiatan perencanaan yang memegang kunci terhadap kelancaran dan keberhasilan pengelolaan tersebut. Perencanaan yang disusun secara komprehensif dan terintegrasi mutlak harus dilaksanakan untuk menciptakan akselerasi pembangunan kehutanan.

Berdasarkan evaluasi kinerja 2001–2005 dalam implementasi Lima Kebijakan Prioritas, dan mempertimbangkan permasalahan yang terus berkembang, maka Departemen Kehutanan memandang perlu untuk menyempurnakan Lima Kebijakan Prioritas guna meningkatkan efektivitas pencapaian program pembangunan kehutanan ke depan melalui penetapan keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 456/Menhut-VII/2004 tentang Lima Kebijakan Prioritas.

Penetapan Lima Kebijakan Prioritas Departemen Kehutanan 2005-2009 pada dasarnya merupakan kelanjutan dan pengembangan dari Lima Kebijakan Prioritas pada tahun-tahun sebelumnya yang sampai dengan tahun 2008 belum tuntas dilaksanakan. Kebijakan prioritas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu illegal;

Kebijakan ini dimaksudkan untuk:

- a. Menegakkan moral, tatanan sosial maupun bernegara dan berbangsa.
- b. Menegakkan kepastian hukum di bidang kehutanan.
- c. Mendorong iklim usaha di bidang kehutanan secara sah dan benar
- d. Meningkatkan partisipasi berbagai pihak serta masyarakat dalam mendukung pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan maraknya perdagangan kayu illegal.
- e. Menjamin keberadaan hutan sebagai modal pembangunan.
- 2. Revitalisasi sektor kehutanan, khususnya revitalisasi industri kehutanan;

Kebijakan ini dimaksudkan untuk:

- a. Mendorong pertumbuhan sektor kehutanan dan industri kehutanan sebesar 2% sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6% pada akhir tahun 2009 melalui upaya peningkatan ekspor dan investasi baru (*pro-growth*).
- b. Menciptakan lapangan kerja baru sebagai bagian dari pengurangan pengangguran nasional sebesar 50% pada tahun 2009 melalui bergeraknya sektor kehutanan di perkotaan / industri perkayuan (*Pro-job*).
- c. Mengurangi kemiskinan masyarakat di dalam / sekitar hutan sebagai bagian dari pengurangan kemiskinan secara nasional sebesar 50% pada tahun 2009 melalui pembangunan hutan tanaman rakyat, pemberdayaan masyarakat di dalam/sekitar hutan (PHBM/pengelolaan hutan bersama masyarakat dan HRPK/Hutan Rakyat Pola Kemitraan) (*Pro-poor*).

- d. Mewujudkan pengelolaan pemanfaatan hutan lestari sebagai bagian perbaikan kualitas lingkungan hidup menuju Indonesia (*Pro-Environment*).
- 3. Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Hutan;

Kebijakan ini dimaksudkan untuk:

- a. Menjaga dan memelihara keutuhan ekositem hutan dan fungsinya
- b. Mempercepat pemulihan hutan dan lahan kritis, termasuk rehabilitasi hutan mangrove dan hutan pantai.
- c. Meningkatkan daya dukung lingkungan lokal, nasional dan global
- d. Meningkatkan manfaat hutan bagi kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara hutan dan berusaha di sektor kehutanan
- f. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja
- g. Meningkatkan dan menjaga daya dukung DAS
- 4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan;

Kebijakan ini dimaksudkan untuk:

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kehutanan.
- b. Meningkatkan akses masyarakat setempat dalam pemanfaatan hutan.
- c. Meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara kelestarian hutan
- e. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan
- Pemantapan Kawasan Hutan ;

Kebijakan ini dimaksudkan untuk:

- a. Menjamin keberadaan kawasan hutan dan penutupan hutan.
- b. Menjamin berjalannya unit-unit pengelolaan hutan untuk berbagai pemanfaatan hutan dan hasil hutan.
- c. Menjamin intensifikasi pengelolaan hutan dan hasil hutan.
- d. Menjamin kelestarian usaha dan daya dukung kehidupan dari hutan.

6. Kebijakan Pendukung

Kebijakan ini dimaksudkan untuk:

- a. Menjamin terselenggaranya proses desentralisasi pembangunan kehutanan yang mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan hutan lestari
- b. Menjamin ketersediaan rencana-rencana kehutanan yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan.
- c. Menjamin kesinambungan Litbang IPTEK.
- d. Menjamin keberlanjutan pengembangan SDM.
- e. Menjamin kesinambungan monitoring evaluasi pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan.

Dalam rangka formulasi kegiatan-kegiatan kehutanan yang terintegrasi dan benarbenar mendukung kebijakan prioritas dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu ditetapkan pencapaian sasaran dan indikator tahunan yang akan dicapai sebagai bentuk penjabaran sasaran strategis yang telah ditetapkan. Identifikasi terhadap sasaran dan indikator ini sekaligus untuk mensinkronkan dengan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dalam kaitan dengan pembangunan sektor kehutanan, kegiatan-kegiatan pokok Renja-KL Departemen Kehutanan, tertampung dalam 10 program yang terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2009, yaitu :

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara, dengan tujuan :

Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas pembangunan dan pelayanan umum terhadap masyarakat, serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja pemerintahan.

2. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik, dengan tujuan :

Meningkatkan pembinaan dan pelaksanaan urusan tata usaha, pengembangan perencanaan dan investasi administrasi keuangan, pengembangan SDM dan administrasi kepegawaian, pembinaan hukum dan organisasi, pengembangan hubungan kerjasama luar negeri dan, pembinaan informasi kehutanan, pengendalian pembangunan kehutanan, serta pembinaan standarisasi dan lingkungan.

3. Program Pendidikan Kedinasan, dengan tujuan :

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan diklat, pengembangan tenaga kediklatan, pengembangan organisasi dan institusi kediklatan, serta pengembangan sarana dan prasarana kediklatan dibidang kehutanan.

4. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK, dengan tujuan :

Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kehutanan dalam rangka mendukung peningkatan pengelolaan hutan produksi, pembangunan dan pengelolaan hutan tanaman, pengelolaan DAS dan rehabilitasi lahan kritis, pengelolaan kawasan yang dilindungi dan pelestarian keragaman hayati, pengembangan hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan, serta peningkatan budidaya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

5. Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri, dengan tujuan :

Meningkatkan koordinasi dengan aparatur penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman) untuk menanggulangi pencurian kayu pada kawasan hutan negara dan praktek-praktek penyelundupan kayu ke luar negeri, serta menyeret pelakunya sampai ke pengadilan.

6. Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan (SDH), dengan tujuan:

- Meningkatkan kinerja pengelolaan hutan alam dan hutan tanaman agar dapat memproduski hasil hutan khususnya hasil hutan kayu secara lestari, meningkatkan produksi hasil hutan bukan kayu, serta meningkatkan kinerja industri perkayuan agar lebih efisien dan mampu bersaing di pasar internasional.
- Mewujudkan prakondisi pengelolaan hutan yang mantap melalui pengukuran, penataan batas, dan penetapan kawasan hutan sehingga memiliki status hukum dan pengakuan dari masyarakat di lapangan, serta menyiapkan unit-unit pengelolaan hutan sesuai fungsinya guna mendukung pengelolaan hutan lestari.

7. Program Perlindungan dan Konservasi SDA, dengan tujuan :

Meningkatkan perlindungan, dan pengendalian kebakaran hutan, pengelolaan Taman Nasional dan kawasan konservasi lainnya, pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, serta perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan kawasan konservasi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam, peningkatan pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistem, serta menguatkan data, informasi, dan kerangka regulasi pengelolaan Taman Nasional dan kawasan konservasi lainnya.

8. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA, dengan tujuan :

Meningkatkan penutupan hutan pada lahan kritis yang tersebar di 282 DAS prioritas, meningkatkan lapangan kerja dalam pembangunan hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan/perhutanan sosial; meningkatkan usaha perbenihan oleh koperasi dan

UKM, serta meningkatkan dukungan kabupaten di daerah hulu dan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

9. Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi SDA dan LH, dengan tujuan:

Menyiapkan data dan informasi SDH yang lengkap, akurat, terkini baik spatial maupun bukan spatial bagi kepentingan pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan kehutanan.

- 10. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH, dengan tujuan:
 - Meningkatkan pengembangan kelembagaan penyuluhan kehutanan, pemberdayaan masyarakat sasaran penyuluhan, serta pengembangan jaringan kerja dan kemitraan penyuluh kehutanan.
 - Mewujudkan pengembangan kapasitas kelembagaan pengelolaan hutan dan ekosistemnya, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan dan ekosistemnya.

Selanjutnya untuk menyelaraskan antara program dalam RKP dengan kebijakan yang telah ditetapkan, dapat dilihat pada matrik keterkaitan dibawah ini.

		KEB	IJAKAN PRIORI	TAS		Kebijakan Pendukung	
PROGRAM	Pemberan-tasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu illegal	Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan	Rehabilitasi dan konservasi SDH	Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan	Pemantapan kawasan hutan	rendukung	
Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara	-	-	-	-	-	V	
Penerapan Kepemerintahan yang Baik	-	-	-	-	-	V	
Pendidikan kedinasan	-	-	-	-	-	v	
Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	-	-	-	-	-	V	
Pemantapan Keamanan Dalam Negeri	V	-	-	-	-	-	
Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH	V	v	-	V	V	-	
Perlindungan dan konservasi SDA	-	-	v	V	-	-	
Rahabilitasi dan pemulihan Cadangan SDA	-	-	v	V	-	-	
Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH	-	-	-	-	V	V	
Pengembangan kapasitas pengelolaan SDA dan LH	-	-	-	V	-	V	

V. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2009

Mengacu pada Lima Kebijakan Prioritas Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009 yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan kehutanan tahun 2009 dengan kegiatan-kegiatan prioritas, antara lain:

A. Pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu illegal :

- Pencurian kayu di hutan negara di provinsi Sumut, Riau, Jambi, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel, Irjabar, Papua dan Maluku menurun secara nyata; Pengamanan swakarsa oleh masyarakat berjalan efektif; Koordinasi penanganan kasus pencurian kayu dan perdagangan kayu illegal berjalan efektif.
- 2. Terbentuknya Ikatan Polisi Kehutanan Indonesia (IPKI) di 10 propinsi.
- 3. Terbentuknya forum komunikasi PPNS kehutanan di 10 propinsi.
- 4. Terlaksananya perekrutan dan pelatihan SPORC sebanyak *1500* orang pada 11 Brigade.
- 5. Terlaksananya pembentukan dan pelatihan PAMSWAKARSA.
- 6. Berkembangnya sarana dan prasarana perlindungan hutan.
- 7. Terselenggaranya koordinasi antar aparat penegak hukum secara nasional.
- 8. Operasi pengamanan hutan, penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan hutan, penyelesaian kasus hukum pelanggaran/kejahatan hutan 75 %.
- 9. Berkembang dan terkendalinya sistem penatausahaan hasil hutan.
- 10. Berkembangnya sistem sertifikasi dan pengujian hasil hutan.
- 11. Terwujudnya optimalisasi PNBP dari hasil hutan kayu sehingga meningkat 15%.
- 12. Terimplementasinya SI PUHH dan Penatausahaan PSDH/DR secara On-Line pada 44 IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT.

B. Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan :

- Terlaksananya produksi kayu dari hutan alam dan hutan tanaman yang dibebani hak sebesar 25 juta m3.
- 2. Tercapainya sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada 15 unit IUPHHK Hutan Alam dan 35 unit IUPHHK melaksanakan Sistem Silvikultur Intensif (SILIN).
- 3. Selesainya rancang bangun pembentukan unit usaha HPH, HTI, dan HTR pada kawasan yang belum dibebani hak/ijin seluas 3,2 juta ha dalam bentuk IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, HTR, dan IUPHHBK.
- 4. Tercapainya penambahan luas Hutan Tanaman seluas 800.000 ha, terdiri dari HTI seluas 600 ribu ha dan HTR seluas 200.000 ha.
- 5. Terfasilitasinya pengembangan HTI seluas 1,3 juta ha (menjadi 5 juta ha) dengan potensi 100 m3/ha; Terselenggaranya pengembangan HTI & HTR melalui skema pinjaman BLU.
- 6. Peningkatan nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu.
- 7. Terfasilitasinya peningkatan produksi industri pengolahan dan pemasaran hasil hutan dibandingkan tahun 2008; Efisiensi pemanfaatan bahan baku meningkat dibandingkan tahun 2008; serta Diversifikasi produk olahan.
- 8. Terpeliharanya model hutan rakyat kemitraan 12.000 ha (60 model inti dan plasma); pemeliharaan hutan rakyat seluas 200.000 ha di 32 propinsi; kegiatan pembangunan hutan rakyat seluas 100.000 ha
- 9. Produksi kayu dari hutan rakyat mampu mencapai 40 m3/ha
- Masyarakat yang berusaha dalam pembangunan HR meningkat sebesar 3 % per tahun, dan kesejahteraannya meningkat sebesar 4 %; Penyerapan tenaga kerja di bidang HR dan HTR meningkat 3 %.

- 11. Terwujudnya performace/kinerja industri kehutanan yang tangguh dan sehat.
- 12. Terlaksananya peningkatan produksi hasil hutan non kayu.
- 13. Terlaksananya deregulasi untuk mendukung iklim investasi dan kesempatan berusaha yang kondusif.
- 14. Terbentuknya pola kemitraan yang saling menguntungkan dalam pengelolaan/ pemanfaatan kawasan hutan produksi alam/tanaman.
- 15. Terlaksananya pengembangan sentra-sentra HHBK (Bambu seluas 2.605 ha di 12 propinsi, sutera alam seluas 160 ha, Sentra Rotan seluas 250 Ha, Sentra Gaharu 800 Ha, Sentra madu 12 Unit, serta Sentra HHBK Unggulan (Seedlak, Tengkawang, Kemiri, Damar, Sagu, Pinus, Aren dan Tanaman Obat) seluas 250 Ha.
- 16. Terbentuknya KPHP Model di 10 Provinsi.
- 17. Terkendalinya areal eks HPH dan HTI di 10 Provinsi.
- 18. Tersusunnya informasi sumberdaya hutan produksi di 21 Provinsi.

C. Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan:

- 1. Tersusunnya rencana dan evaluasi pengelolaan DAS Prioritas di 33 Propinsi; Tersusunnya kebijakan pemantauan dan evaluasi PDAS.
- 2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi daerah rawan bencana alam (banjir dan longsor, biofisik dan sosek) di DAS Prioritas.
- 3. Terlaksananya pengembangan model rehabilitasi DAS.
- Tersusunnya rencana teknis RHL Gerhan seluas 1,3 juta Ha di lahan kritis DAS Prioritas.
- 5. Terbangunnya tegakan sumber benih prioritas seluas 1.500 Ha di 12 Propinsi.
- 6. Terselenggaranya pengembangan sipil teknis dan konservasi tanah di DAS prioritas.
- 7. Menurunnya hot spot menjadi sekitar 0-10% dari tahun 2006.
- 8. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan di 10 provinsi rawan kebakaran hutan.
- 9. Meningkatnya kelembagaan pengendalian kebakaran hutan pada 10 provinsi rawan kebakaran hutan.
- 10. Tercapainya pengelolaan dan pemanfatan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru, dan hutan lindung secara efektif.
- 11. Pengembangan dan pemanfaatan JL, WA, BCA dan PM terlaksana secara optimal sehingga tersedia peluang usaha dan kesempatan bekerja seluas-luasnya bagi masyarakat.
- 12. Meningkatnya kawasan luasan hutan di daerah perkotaan (Hutan Kota).
- 13. Peningkatan produk Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) dan jasa lingkungan 2% dari tahun 2008.
- 14. Peningkatan penyerapan tenaga kerja pada TSL dan pada pengelolaan Jasa lingkungan/wisata alam sebesar 2% dari tahun 2008.
- 15. Terwujudnya pengelolaan TSL langka dan terancam punah (gajah, harimau, badak, komodo, orangutan, jalak bali) khususnya di 21 TN Model.
- 16. Pengembangan budidaya, penangkaran dan nilai tambah produk Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL).
- 17. Terwujudnya sinkronisasi dan pelaksanaan dan pengendalian program, kegiatan dan rencana-rencana teknis pengelolaan kawasan konservasi.

D. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

- 1. Terbangun Kelompok Tani HKm.
- 2. Terfasilitasinya perijinan HKm seluas 400.000 ha di 25 propinsi dan ditetapkannya areal kerja HKm di 15 lokasi.
- 3. Tersedianya cadangan dan penetapan areal Hkm.
- 4. Terselenggaranya Legislasi dan Perencanaan Pengelolaan Hkm.
- 5. Terbangunnya Wanatani, AUK dalam rangka pengembangan Hkm.

- 6. Meningkatnya usaha masyarakat sekitar HP melalui pembangunan kelembagaan usaha ekonomi dan pengadaan peralatan/mesin industri pengolahan hasil hutan untuk bantuan kepada industri kecil menengah.
- 7. Terlaksananya pembuatan persemaian/bibit meranti untuk bantuan kepada masyarakat sekitar hutan dalam rangka pengayaan HP.

E. Pemantapan kawasan hutan:

- Tersedianya data dan statistik kehutanan yang dapat dipertanggung jawabkan; Tersedianya data dan informasi SDH yang lengkap, terkini, terstruktur, dan dapat dipertanggung jawabkan dalam bentuk spatial maupun non spatial; Tersedianya NSDH provinsi dan nasional; Teraksesnya data dan informasi SDH oleh masyarakat luas.
- 2. Terencananya penyiapan prakondisi pengelolaan hutan yang kondusif bagi usaha kehutanan.
- 3. Inventarisasi hutan nasional.
- 4. Pembuatan peta-peta tematik kehutanan.
- 5. Pemanfaatan teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografi dalam pengelolaan data spasial tematik kehutanan.
- 6. Pengembangan sistem jaringan informasi kehutanan di 17 provinsi.
- 7. Terlaksananya sinkronisasi proses penataan ruang di wilayah perbatasan dengan peta kawasan hutan.
- 8. Teridentifikasinya kondisi batas kawasan hutan yang belum ada dan sudah ditata batas; Bertambahnya penataan batas kawasan hutan sepanjang 15.000 km di 26 propinsi.
- 9. Bertambahnya 12 juta ha kawasan hutan yang ditetapkan.
- 10. Bertambahnya pengakuan masyarakat dan para pihak terhadap kawasan hutan yang telah ditetapkan.
- 11. Tersusunnya peraturan dan pedoman penggunaan kawasan hutan.
- 12. Terselesaikannya perubahan peruntukan dan tukar menukar kawasan hutan; Terkendalinya perubahan fungsi, serta penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Terlaksananya penunjukan kawasan hutan provinsi di 8 (delapan) provinsi, dan penunjukan kawasan hutan partial di 75 lokasi.
- 13. Ditetapkannya wilayah KPH di 28 provinsi; Terwujudnya prakondisi penetapan organisasi KPH di 28 unit; Tersusunnya rencana pengelolaan KPH sebanyak 28 unit.

F. Kebijakan pendukung

- 1. Penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 2. Pengembangan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan kehutanan regional.
- 3. Pengembangan ketata usahaan pemerintah dan pengelolaan sarana dan prasarana Dephut; Pengembangan Perencanaan dan Administrasi Keuangan.
- 4. Pembinaan Hukum Perundang-undangan Kehutanan.
- 5. Penelitian dan pengembangan IPTEK; Pengkajian dan Penerapan Hasil Litbang.
- 6. Pengembangan SDM dan kelembagaan; Penyelenggaraan kepegawaian
- 7. Kerjasama kemitraan bidang konservasi SDA dan LH serta penerapan konvensi internasional; Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri dan Investasi bidang Kehutanan.
- 8. Penyelenggaraan Standardisasi dan Lingkungan Kehutanan
- 9. Penyusunan rencana kehutanan; Evaluasi pelaksanaan rencana kehutanan
- Sosialisasi, pelaksanaan, dan pemantauan berbagai perjanjian internasional baik di tingkat Pusat maupun Daerah

VI. PENYUSUNAN RENJA-KL TAHUN 2009

Kegiatan-kegiatan pembangunan kehutanan pada dasarnya dirancang sebagai bagian dari kegiatan-kegiatan pokok yang tertuang dalam Renstra Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009 (Penyempurnaan), serta disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009 termasuk di dalamnya Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2009 yaitu:

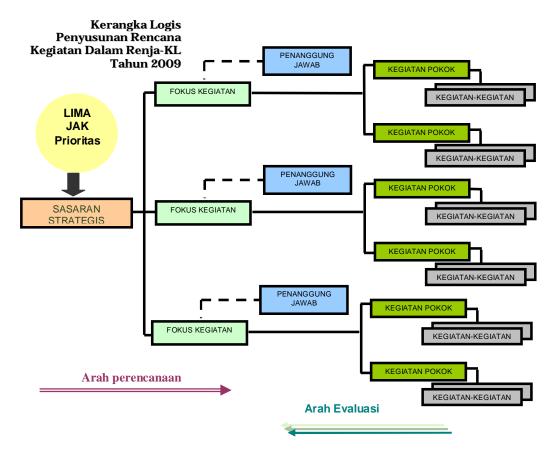
- 1) Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Perdesaan
- 2) Percepatan Pertumbuhan dan Berkualitas dengan Memperkuat Daya Tahan Ekonomi yang Didukung oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur, dan Energi.
- 3) Peningkatan Upaya Anti Korupsi, Reformasi Birokrasi, serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Dalam Negeri

Dari ketiga prioritas tersebut di atas, kegiatan pembangunan kehutanan termasuk dalam prioritas kedua pembangunan nasional yaitu *Percepatan Pertumbuhan dan Berkualitas dengan Memperkuat Daya Tahan Ekonomi yang Didukung oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur, dan Energi.*

Berdasarkan program pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009, pembangunan kehutanan terkait dengan 10 program, yakni : 1) Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara; 2) Penerapan Kepemerintahan yang Baik; 3) Pendidikan kedinasan; 4) Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 5) Pemantapan Keamanan Dalam Negeri; 6) Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH; 7) Perlindungan dan konservasi SDA; 8) Rehabilitasi dan pemulihan Cadangan SDA; 9) Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH; dan 10) Pengembangan kapasitas pengelolaan SDA dan LH.

Disamping itu kegiatan-kegiatan pokok pembangunan kehutanan juga diarahkan untuk menunjang Lima Kebijakan Prioritas Departemen Kehutanan. Pada tahun 2009 Kegiatan Pembangunan Departemen Kehutanan dapat mendukung fokus peningkatan kualitas pertumbuhan pertanian, perikanan dan kehutanan; serta fokus peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim global. Adapun kegiatan-kegiatan pembangunan Departemen Kehutanan secara lengkap disusun dalam matrik kegiatan Renja-KL Departemen Kehutanan Tahun 2009 yang dapat dilihat pada Matriks Renja-KL ini.

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa untuk mencapai sasaran strategis pembangunan kehutanan lima tahun sebagaimana ditetapkan dalam Rencana **Strategis** Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009 (Penyempurnaan), kegiatan-kegiatan penyusunan pada Renja KL Departemen Kehutanan Tahun 2009, kegiatan-kegiatan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Untuk itu penyusunan Renja KL Departemen Kehutanan tahun 2009 dilaksanakan sesuai dengan alur pada gambar berikut.



Gambar. Alur penyusunan kegiatan Renja-KL Departemen Kehutanan Tahun 2009.

MATRIKS RENJA-KL DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN 2009

ana asi naan D		0	:0			
Rencana Alokasi Pendanaan P D		-	0	0	Ö	0
Penanggung Jawab		Ditjen PHKA, Setjen, Ditjen BK, BALITBANG				
Keluaran/Indikator		. 500 kall operasi fungkional oleh 77 upt (8 BBTN, 8 BBKSDA, (8 BBTN, 8 BBKSDA, 42 BTN dan 19 BKSDA), 11 Brigade SPORC dan Dishut 33 Propinsi.	150 kali operasi gabungan oleh 77 UPT (8 BBTN, 8 BBKSDA, 42 BTN dan 19 BKSDA), 11 Brigade SPORC dan Dishut 33 Propinsi.	Tersedianya standar, kriteria dan indikator, draft Permenhut; buku statistik PPH; juklak/juknis	- Terbentuknya IPKI di 10 propinsi	ebanyagaran Polhut sebanyak 500 orang, Dikat Polhut dan PPNS: 120 org PPNS: 60 org ABK; 900 org SPORC; 25 org Pembina SPORC/KaBalai
Kegiatan Tahun 2009		Operasi Pengamanan Hutan Operasi-operasi pengamanan fungsional	Operasi gabungan	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Hutan Penyusunan standar, kriteria dan indikator; Penyusunan draft Permentut; Penyusunan buku statistik PPH; Penyusunan juklak/juknis	- Pembentukan IPKI; Penyegaran Polhut	Pelatihan/penyegaran POLHUT/PPNS
Indikator Sasaran Kegiatan Pokok		Lumlah kejadian pencurian mehurun Tidak terjadi koniik antara masyarakat dengan masyarakat dengan masyarakat dengan masyarakat dengan masyarakat dengan pengelola kawasan huran pasca operasi iligali logging perindungan huran dan sarana perindungan huran pada 77 UPT (8 BRIN, 8 BRSDA), dan Dishut Prop* Penyelesalan kasus sampal itngka P.21				
Kegiatan Pokok		10. Pengamanan kawasan hutan.				
Fokus Kegiatan/Penanggung Jawab Fokus	am : Pemantapan Keamanan Dalam Negeri	Pengamanan Kawasan Hutan Peranggung Jawab Peranggung Jawab Perindungan Hutan, Ditjen PHKA)				
Sasaran Strategis	ıram : Pemantapan Ke	Tidak ada lagi pencurian kayu skala besaru fi hutan negara.				

No. Sasaran	Fokus Venlatan / Denamening	Keglatan Pokok	Indikator Sasaran (1) Keglatan Tahun 2009		Keluaran/Indikator	Penanggung Ta	Penanggung F F Rencana G A Jawab
	Jawab Fokus						Pendanan Sp. 13 T. D. Sp. 14 T. D. Sp. 15 T. D. Sp. 14 T.
				rutmen anggota Polhut	- Terpenuhinya kebutuhan POLHUT terutama pada BTN baru		,
				Gelar pasukan di 10 propinsi rawan	 Kesiapsiagaan para pihak dalam penegakan hukum 		
				- Penertiban senpi	 Terselesaikannya administrasi dan distribusi senpi 		->
				Pengadaan Sarana Prasarana Linhut	 Tersedianya sarana prasarana yang mendukung kegiatan Linhut 		7
				Kampanye penegakan hukum IL, ISL, Perambahan	 Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam penegakan hukum II, TSL, perambahan TSL, perambahan 		¥
				Peningkatan koordinasi dan kenjasama dengan instansi terkati Inpers 4/2005; Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan Negara, Jinstansi, Mitra, dan Lish terkat	Terjalinnya kerjasama dalam penyalesaran kasus-kasus kejahatan kehutanan		**
				- Pembentukan forum komunikası PPNS kehutanan	 Terbentuknya forum komunikasi PPNS kehutanan di 10 propinsi 		
				<u>Pen</u> yelesalan Kasus Hukum <u>Pelangaran/ Kelahatan Keh</u> utanan			>
				Penyelesaian perkara sampai P 71 tinggal 50% dan penyelesaian perkara baru mencapai 75%	Turggakkan kasus yang P21 tinggal 50%, penyekaalan kasus baru mencapai 75%		
Phodesing weithantaban	Thoran in Palanta ben'n fatan ekana 1804 kali ya in in in ang ang ang ang ang ang ang ang ang an						The Swift Special of
2. Ildak terjadi Pelanggaran tata Usaha hasil huton.	2. Penerthan Peredaran Hasil Hutan Penanggung Jawab Onrektur Bina lurar Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan, Diten BPK)	9. Penertiban tata usaha hasil hutan.	Menurunnya kegiatan ilegal logging, tertibnya pengukuran dan pengujian seria peredaran hasil hutan	- Pengembangan sertifikasi dan pengujian hasil hutan	Tersedianya sarana prasarana settifikasi hasil hutan Tersedianya tenaga dan instruktur PPHH- BK	Ditjen BPK, Ditjen PHKA, Setjen. Iljen	7
				- Optimalisasi penerimaan negara bukan pajak	. Peningkatan PNBP sebesar 15 %; Sistem informasi secara online pada 44 IUPHHK-HA Dephut		>
				Pengendalian peredaran hasil hutan dan penertiban hasil hutan illegal	 Tersedlanya tenaga pegawai sebagai saksi ahli 		7

icana ikasi anaan D	>	>	"	~	'>	7	*>	7	>	>	7	>	7		7
Fr Alc	7	7	>	7	>	~		>	*>	->	>	7	7		-
Penanggung Standardara Jawab Standardara Alokasii. Pendanaan Standardara Stand		Dítjen BPK , BAPLAN, BALITBANG, Setjen						Ditjen BPK , BAPLAN, Ditjen RLPS, Setjen, BALITBANG							
Keluaran/Indikator Penanggung A Keluaran/Indikator Jawab A Maran Andrea A Mandrea A Maran Andrea A Maran Andrea A Maran Andrea A Maran Andrea	 Tertibnya pengujian dan penatausahaan hasil hutan 	1.5 unit manajemen IUPHHK mendapat sertifikat PHPL mandatory dan berproduksi secara lestan	 Data dan informasi produksi Hff pada unit IUPHHK 	Data dan Informasi kemitraan/kelola sosial pada areal IUPITHK	Data dan informasi pelaksanaan PHPL (actron plan) IUPHHK	Peluang usaha masyarakat sekitar hutan	Risalah dan Berita Acara Pokja restruktunsasi pemantaatan HP alam	Rencana Pengelolaan Hutan Tanaman 164 unit HTI	Meningkatnya performance 164 unit manajemen HTI	Data dan informasi pembangunan HTI	Data dan informasi pembangunan HTI	Data dan informası kinerja unit manajemen HTI	Data dan informası 164 unit manajemen HTI untuk pembinaan	Kesamaan persepsi pelaksanaan PERMENHUT sebagai tridak lanjut PF 6/2007 1.o PP 3/2008	93,333 unit ijin HTR (1
	Pengembangan SIM pengujian dan penatausahaan hasil hutan	Pembinaan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hutan alam	Pembinaan dan pengendalian produksi hutan	Pembnaan dan pengendalian pengelolaan sosial/kemitraan hutan alam	Penilaian kinerja usaha pemanfaatan hutan	Peningkatan usaha masyarakat sekitar hutan	Pembinaan, pengendalian dan penilaian kinerja IUPHHK-HA	Perencanaan	Pembinaan	Pengendalian	Pengawasar.	Penilaian	Monitoring dan Evaluasi	Sosialisasi dan Evatuasi efektifitas PERMENHUT sebagai tindak lanjut PP 6/2007 J.o PP 3/2008	Pembangunan Hutan Tanaman
Kegiatan Tahun 2009 Kegiatan Tahun 2009 Polok		15 Unt (1998) bersetufikat PHP, mandatory, 35 unt HPH meleksanekan sistem silvikuttur intensif,						Hutan Tanaman - Hutan Tanaman seluas 800.000 - Ha terdir dan HTJ seluas - 600.000 ha, dan HTR - seluas 200.000 ha					•		
Keglatan Pokok		7. Pengelolaan (pemanfaatan) butan produksi alam.						6. Pengembangan hutan tanaman							
Sasaran Folkus Fokus Fokus Listategis Kegiatan/Penangung Listategis Jawab Fokus		Pergeloban Pemanfaatan Hutan Produssi Alam Penanggung Jawab (Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam, Ditjen GPK)						Pengalaian Pemanfaatan hutan tanaman Penanggung Jawab (Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman, Digen BPK)							
Sasaran		Tercapainya pengelolaan hutan lestari.						Terwujudnya hutan tanaman yang produktif.							
9 2		mi						ਚੰ							

VyAlokasi X		?	7	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7	>	7	>	·9	7
Penangung Jawab (**) Alokasi (**) Jawab (**) Pendanaan				Ditjen BPK, Ditjen RIPS, Setjen, BAPLAN.					Diten BPK, BALITBANG,	
Keiuaran/ Indikator	Dukungan masyarakat dan pemda	Data dan informasi calon areal 1,4 juta Ha dan calon pemegang ijin HTR 93.333 KK	Data dan informasi 92 unit manajemen HTI patungan melakukan restrukturisasi	Kawasan hutan yang tudak dibebah mak (bekas HPH/HPHTI) ada penglolaanya dalam bertuk (11PHK H4/HT/HTR (3.2.)uta Ha)	Kawasan hutan areal ex HPH/HPHTI aman	Tertatanya areal dan unit kelola UPHH: HA/HT dalam unit-unit manajemen	Meningkatnya kemampuan dan kapasitas kelembagaan dan investasi UPHHK	Data dan informası SDH untuk usaha pemanfaatan Hutan Produksi	Products indicate indicate programme products in the programme and indicate	Tersusunnya pemolaan pemanfaatan industri primer hasil hutan
	Sosialisasi dan promosi	Identifikasi calon areal dan pemegang ijin HTR	Melanjutkan restrukturisasi perusahaan perregang ijin HTI	Penahan pemarfaatan hulan produksi	Pengawasan dan pengamanan areal ex HPH/HPHTI	Penyiapan areal dan unit kelola UPHHK Hutan Alam/Hutan Tanaman	Pembinaan kapasitas kelembagaan dan investasi UPHHK	Penyusunan dan pengembangan data dan informasi SDH hutan produksi	hasil hutan dan produk industri hasil hutan	Pemolaan industri primer hasil hutan berbasis hutan rakyat
indikator Sasaran Kegiatan Pokok				Secretaria stancia balgum - Secretaria balgum balgu					Permication to all smithable of an market host fundamental post fundamental	
Keglatan Pokok				5. Pengelolaan Hutan Produksi Alam yang tidak dibebani Hak/ijin pemanfaatan.					8. Restrukturisasi Industri filmer kehutanan.	
Sasaran Fokus: Strategis Keglatan/Penanggung				Pengaldiaan Hutan yang Lidk Ulbebani nak Penanggung Jawab (Direktur Bian Bencana Permanfantan Hutan Peduksi, Ungen BiPk)					6. Resextressas Industri Priner Keltstrann Penantgung Jawab Penasaran Hasil Hutan, Dipen BPK)	
				Terkelolanya Kawasan Intan Dekas HPH dan HPHTI.					Terwijudnya efisiensi Thdusen Pinner Kehudanan .	
2				ហំ					ý	

or es	增 后										
Rencana	Pri Pendanaan Pri			•	7	>					
Ren	Pend	~	~	7	>	7	~	->	>	~	->
Keglatan Tahun 2009 Keluaran/Indikator Penanggung 小子家Reficena											
ē.				ć							
Penanggu Jawab	\$11 i. Q			BAPLAN, Setjen Ditjen PHKA							
Pena				BAPLAN, Se Ditjen PHKA							
	#			B Ã			•				
tor		Ē	luksi	uhan prop	ahan bagar an TRWK	st OH, am am san ing,	dan dan		ntası dan	l tata olders 0 kab	tan aidah
ndik		Informasi kinerja IPHHK di 10 propinsi	Analisa trend produksi kayu	Ookumen pengukuhan Ookumen bahk, 3 prop ,8 kab dan 15 lokasi	Hasil kajian perubahan kawasan hutan sebagai bahan integrasi penataan kehutanan dalam RTRWNRTRWP/RTRWK	Oxte dan informasi informasi and an	Peta trayek batas KH terbaru, 14 lokası dan 119 Km	Laporan hasil rekonstruksi batas 2.746,4 Km	Laporan hasil orientasi batas di 20 lokasi dan 3.090.2 Km	Diketahuinya hasil tata batas oleh stakeholders di 27 lokasi dan 20 kab	BATB kawasan hutan yang memenuhi kaidah
'an/I		Informasi kinerja IPHHK di 10 propi	sa trer	men p ertata Ib dan	Hasil kajian peri kawasan hutan bahan integrasi penataan kehuti dalam RTRWN/RTRWP/ di 33 propoinsi	Data dan inform calon lokasi yar dutunjuk sebaga 114 lokasi yar Terwujudnya ki idendrikasi permasialahan da kawasan hutan produksi dan lir 23 lokasi Teridentrikasin pragalah-masal	trayek iru, 14 Km	Laporan hasil rekonstruksi t 7.746,4 Km	Laporan hasil batas di 2010 3.090.2 Km	ahuin; oleh lokasi	kawa:
elua		Infor	Analis	N H R R K R	Hasil k kawasz bahan penata dalam RTRWM	Data calori ditun 14 lo Terwa ident perm kawa prodi 23 lo 73 lo Terid mass	Peta tray terbaru, 119 Km	Lapo rekor 2.74	Lapo batas 3.09	Dikel batas di 27	BATE
	3	•		T.							
		rimer	hasıl	<i>T</i>	ruang		v				
200		ustri p	asarar	m. m.	an Kav a tata	ilahan	Inventansasi trayek batas				æ
ahun		pui elua	an per	an Huts	rencar	an ass	i traye	Batas	Se	itas KH	aan BA
tan 1		an kine utan	pang	Cawasa	kasi Padalam dalam	kasi P in huta	tansa	truksi	isi Bat	sasi Ba	ubnung
Kegia		Penilaian kinena industri primer hasil hutan	Pengembangan pemasaran hasil hutan	Penelusuran dokumen Tata Batas Kawasan Hutan.	Identrikasi Perubahan Kawasan Hutan dalam rencana tata ruang	identikasi Pernasalahan kawasan hutan	Inver	Rekonstruksi Batas	Orientasi Batas	Sosialisasi Batas KH	Penyempurnaan BATB
	4 1										
				ia tan							
aran kok				koodinasi penelapan luusan hutan dalam provinsi, tar ruang provinsi, tar ruang penalapan batas kawasan hutan (1 26 provinsi) sepanjang 15 000 km; Penelapan kawasan hutan pennjaban kambal tata pennjaban kembal tata pennjaban kembal tata ketutam di P. Jawa, Ketutam di P. Jawa, Adimasan, Sumaten, Adaman							
r Sas				is pene tan da data rua batas 26 prov 26 prov 30 15.00 n kawa 30 kem an dar an dar an kem an an kem an an kem an an kem an an kem an an a							
fikato				koordinasi perelaha liusaa hukan dalam provisi bada usong provisi badas kawa hukan di 26 promisi sepanjang 15,000 ki sepanjang 15,000 ki sepanjang 15,000 ki sepanjang 15,000 ki sepanjang 15,000 ki sepanjang dalam pennyauan kembali pennyauan kembali terutama di P. Jawa, dan Sulawasi							
ī,				8 3 5 9 5 5 5 5 8 5 8 5 8 5 5 5 5 £							
Keglatan/Penanggung Pokok Keglatan Pokok											
r z				uhan							
Poko				3. Pengukuhan kawasan hutan							
¥				9. E. H.							
ē				ala ala							
nggu	Sn			Pengukuhan dan Pengagunaan kw. Hutan ara nggung Jawab (kepala ara nggung Jawab (kepala arangunaan Kawasan lan)							
Pena	P. Fok			aan dan aan Ky Jawa l Jawal Kawa							
tan/	awa			gukuh etagung gung enguki punaan							
Kegt				16 Pengukunan Kar Hutan Pengugung Jawah (Kepila Pengugung Jawah (Kepila Pusi Penguhan ian Penasauraan Kawasan Hutan)							
्र इन्द्रहरू											
Sasaran Strategis				emenyikan kwasan hutan di Indonesia hutan di Indonesia hutan di Kwasan keliush kwasan hutan.							
Sasaran Strategis	ない ない			ainya ukan k di Indo netapa 30 % 1 Kawi							
SS	erije. Rođe			Tercapainya hawasi pununjukan kawasi hutan di Indonesi a selina di Pudopannya delira 30 % di duri seliruh. Kawasan hutan.							
0.4	and a										
15.12	der v			κ'							

7 Rencahari 1 Calokasi Pendanaan 1 P		7	9	79	· ~	·	'>-	· · ·	'>
Penanggung Jawab	BAPLAN , Ditjen PHKA, Ditjen BPK, Setjen								
Keluaran/Indikator	untuk disahkan Menhut Persturan bidang penggunaan kawasan hutan 1 paket	 Laporan hasil evaluasi pinjam pakal kawasan hutan, 26 lokasi 	Laporan hasil kegiatan montorang dan evaluasi penggunaan evaluasi penggunaan kawasan hutan di 58 kah dan 21 lokasi Laporan hasil evaluasi pinjan pakai KH di 37 lokasi	- Terselesaikannya permasalahan penggunaan kawasan hutan di 10 propinsi	Rekomendasi hasil pengkajian dalam rangka penggunaan kawasan hutan di 10 lokasi	Laporan penyusuran data dan informasi pengujuaan KH di 33 propinsa Propinsa Propinsa Teresidanya data dan informasi pengunaan KH yang benar dan kH yang benar dan Akurak pengunaan KH yang benar dan sistem informasi pengunaan KH, i	 Terwujudnya kebijakan perubahan peruntukan status dan fungsi KH yang relevan 	Permohonan permohonan pelepasan dan atau TMKH yang layak diberikan ijin dikerahu	Rekomendasi dapat digu-nakan sebagai
Kegiatan Tahun 2009 Keluaran/Indikator Senanggung. Jawab	Penyusunan peraturan dan pedoman penggunaan kawasan hutan	Penelaahan permohonan pinjam pakai KH	Monitoring dan evaluasi Penggunaan KH	Fasilitasi penyelenggaraan masalah penggunaan KH	Pengkajian terpadu permohonan penggunaan KH	Pengembangan basis data penggunaan KH	Pengaturan kembali perubahan peruntukan/ status dan fungsi KH	Penelaahan perubahan KH pada tahap persetujuan prinsip dan SK pelepasan KH dan/TMKH	Evaluasi fungsi kawasan hutan
		- Per	. Mo	. Fas	. Per	Pad .	. Pen	Per tah SK	. Eve
Kegiatan Pokok	terkendalinya pengaraan, perubahan peruntukan, perubahan fungsi, dan pemanfastan kawasan hutan diseluruh Indonesia								
· Keglatan Pokok	4. Penylapan dan evaluasi penggunaan dan perubahan kawasan hutan.								
Wide States A Keglean/Penangung States States A Keglean/Penangung	16. Penjukuhah dan Pentagunaan Kw. Hutan Penanggung Jawab (Kepala Pisat Pengukuhan dan Pentagunaan Kawasan Hutan)								
Strategis	Penggunaan dan perutahan kawasan hutan di seluruh Indonesia terkendali								
No.	œ								

Rencana Alokas Erial Pendanaan C		· ·	>-	>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Penanggung Jawab		BAPLAN, Setjen, Dujen BK, Ditjen PHKA, BALITBANG.			Ditjen RFPS, Ditjen RPK, Ditjen PHKA. FALITBANG.
Keluaran/Indikator	perubahan fungsi KH	Pedoman Pembangunan KPH Kebigkan SDM TK. Provinsi dalam rangka pengelolaan KPH, 21 propinsi	Action plan pembangunan KPH Tk. Provinsi di 21 Propinsi dan 14 Kab.	Pete will year KPH dispakekt. Reportursi yeng telah dispakekt. Lettala persebabai ulmah persebabai dan Kedarian kelah dan Kedarian kelah dan Kedarian kelah dan kedarian kelah dan kerapangan organisasi KPH Motel menuju Reporturan persebagai organisasi KPH Motel menuju Reporturan Reporturan HERI panaka panasa KPH Model panaka panasa KPH Model menujuran sistem pembanguran KPH Tereujuran sistem pembanguran KPH Model menujuran Reporturan	Sentra-serina HHBK (Bembu veluas 2.605 ha di 12 propinsi, sutra alam seluas 160 ha. Sentra Roban seluas 250 Ha, Sentra Gaharu BoO Ha, Sentra madu 12 Unit, serta madu 12 Unit, serta Sentra HHBK Unggulan (Seedlak, Tengkawang,
Keglatah Tahun 2009 Ketuaran/Indikator		Pengerrbangan kebjakan prembanganan KPH	Perencanaan strategis dan operasional pembangunan KPH	presiles imperientas peniberanguan KPH: penetapan walyah KPH; penetapan pe	Furtdoya HFBK
Indikator Sasaran Kegiatan Pokok		Diterativamys willsysh WPH dt 28 provinsi; Terwiludinya prakondisi penetipan organisasi KPH di 28 unit, dan Tersusunnya rencana pengelolaan RPH sebanyak 28 unit			neminplate in proutuksi dan nala tantaba Hasul Hutan Baban Kaya. Terlaksananya serra-terlaksananya serra-terlaksananya serra-terlaksananya serra-terlak Dan ti 12 propinsi, satera alam propinsi, satera alam ratan seluna 250 ha, sortra ratan seluna 250 ha,
Keglatan Pokok		17. Pembangunan KPH.			28. Pergembangan pemanfaatan HHBK.
No. Sasaran Fokus Kejatan/Penangung Kejatan/Penangung		Perribangunan Wilayah Pergalaan Kawasan Hudan Hudan Perangung Jawab (Kepala Pusat Wilayah Pengelalan Kawasan Hutan, Baplan)			14. Percurnbangan Penandakan Hadi Hutan Bulan Kayu Peangung Jawab (Oirektur Bina bernanan Sosial, Dilen RLPS)
Strategis		Terbangun dan beroperasinya KPH di sebap provinsi.			Tercapainya pemandratan hasi butan non kayu secara optimal dan lestari
2		ø.			10.

Penanggung 가 Reficana (1) Jawab Alokasi 관형 Pendanaan 보유		**************************************	· ·····	··· ··· ··· ·· ··· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ··			Pelaksana vi Ditjen RLPS, PelaLM, Setjen, nitian RDK		77	· ·	· '7		***************************************	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
99 Keluaran/Indikator	Kemiri, Damar, Sagu, Pinus, Aren dan Tanaman Obat) seluas 250 Ha.	 Tersosialisaskannya pengembangan usaha HHBK di 33 propinsi 	 Penguatan kelembagaan mitra kerja/ormas dalam pengembangan HHBK 	 Termonitornya kelemahan/kendala dan keberhasilan dalam pengembangan pemanfaatan HIBK 	Berkembangnya inovasi produk olahan HHBK	Terbangunnya Jejaring Kerjasama dan peluang usaha dalam rangka pengembangan Agroforestry	- Tersedianya grand Pestrategy Hkm BA	i	- Tersedianya cadangan dan penetapan areal Hkm	 Terbangunnya wana tani AUK dalam rangka pengembangan Hkm 	 Terfasilitasınya perijinan HKm seluas 400,000 ha or 25 propinsi dan dibelantanna areal 	kerja HKm či 15 lokasi. (lokus??)	. Terbangunnya kelompok tan Hkm	Terbangunnya jaringan Informasi pasar dan Investasi
Kegiatan Tahun 2009 Keluaran/Indikator		Sosialisasi pengembangan usaha pemanfaatan HHBK	Penguatan kapasitas kelembagaan dan kemitraan	Montoring dan Evaluasi Pengembangan Pemanfaatan HHBK	Pengembangan Teknologi Industri Kecil Pasca Panen	Fasilitasi Pertemuan antara Kelompok, Dinas/UPTdengan Pengusaha dalam rangka Pengembangan Agroforestry	Penyusunan Rencana Pembangunan HKM 5 Tahun		Inventarisasi dan identifikasi calon arcal Hkm	Inventansasi dan identifikasi potensi usaha-usaha HKm	Montoring dan Evaluasi ijin usaha HKm dan LUPHKM yang telah diterbitkan		Penguatan Forum Kelembagaan HKm	Pengembangan Jaringan Informasi pasar dan Investasi
Indikator Sasaran 7 Keglatan Pokok	sentra gaharu (800 ba, sentra madu 12 unit, serta sentra hasil Hudan Bukan Kayu (HHRX) unggulan seluas 250 ha); Agridonseriy seluas 3.200 ha di 7 propinisi.						Peningkatan partisipasi nasyarakat dalam pengembangan hutan kemasyarakatan.							
Keglatan Pokok							31. Pengembangan Hutan Kemasyarakat an.							
Mo Strategis Keglatan/Penangung							15. Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (Hkm)	Penanggung Jawab (Direktur Bina Perhutanan Sosiai, Ditjen RI.PS, Baplan)						
No Strategis							Berkembangnya model pengelalaan Hutan berbasis masyarakat.							
2							.11							

Rencana					7		7	خ.	. 7	: ~
Rencana Alokasis Pendanaan	>	9	-		19		-	**		
Penanggung Jawab	Ditjen RLPS, BALITBANG				Ditjen RLPS, Ditjen PHKA, BAPLAN. Setjen, BALTIPANG					
22	Tersedianya apilkasi system zonasi perbemban Berkembangaya iletworking perbemban	 Teridentifikasi dan sertifikasi sumber benth, program seed for people 1500 ha di 12 propinsi (lokus??) 	 Meningkatnya kelembagaan usaha perbenihan 	 Sertifikasi mutu benih dan bibit 	- Tersedianya peraturan bidang Rehabilitasi Hutan dan lahan		 Terwujudnya kemampuan dan peran masyarakat madani dalam upaya RFL 	rerselenggaranya pembadan hamman dan bangunan sipil terselenggaranya Terselenggaranya Kegatan penyedinan bibit, terselabintasinya sumber mata air	Terbangunnya areal model refabilisasi model refabilisasi mangrove/kawaan partei sampai penneliharaannya Terselenggaranya Terselenggaranya mangrove	 Terlaksananya perlindungan kiri kanan sungai
in Kegiatan Tahun 2009 Keluaran/Indikator	Zonasi pertemlan dan system informasi dan peningkalan kualitas SDM	Pengembangan sumber benih	Pengembangan usaha dan kelembagaan perbenihan tanaman hutan	Pengendalian peredaran perbenihan tanaman hutan	Penyusunan, penyempurnaan dan sosialisasi peraturan perundang undangan		Peningkatan kapasitas kelembagaan RHL	Penyelenggaraan rehabilikasi kawasan hutan di DAS Prioritas	Penyelenggaraa, rehabilitasi kawasan partai, mangrove di DAS prioritas	Pengembangan sipil teknis dan konservasi tanah di DAS prioritas
Indikator Sasaran Keglatan Pokok	Pergentangan sumber service from the pergental and service from the servic				Gerhan seluas 1,3 juta ha di lahan kritis DAS prioritas					
Keglatan Pokok	11. Pengembang an Perbenihan.				26. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).					
NG HE Sagaran D. H. Forkis Section of the Control o	7. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Peranaganab Cirekur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Digen R.US)				7. Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Penanggung Jawab (Direktur Bina Renabilitasi Hutan dan Lahan, Ditjen RLPS)				
No Carategis Strategis	Tersedianya bibit yang memerului persyaratan untuk RPL tersedia dan kersebar di kersebar di kebupaten sisuai kebutuhan.				Tercapainya perbaikan penutupan lahan kritis di DAS	prioritas, termasuk perlindungan Daerah Tangkapan Air (DTA)				
2	12.				13.					

Rencana	M.C. Letter	7	>	**	ح	~	7	~		~ .
Penanggung Jawab					Ditien RLPS, Ditlen PHKA, Setjen BALTRANG, Ditjen BPK.		Pelaksana Ditjen RLPS, BAP(LAN, BALITBANG. Setjen			Ditjen RLPS, Ditjen BPK, Setjen, BAPLAN
Keluaran/Indikator		Tersusunnya RTT RHL tahun 2009 Telaksananya monitoring dan evaluasi RHL dan model/bibit	Terselenggaranya pengadaan bibit HR di 10 kab/kota	Tersedianya bibit penghijauan Terlaksannya monev penghijauan swadaya penghijauan swadaya Terlaksananya Gerakan Bina cinta Lingkungari	Terbentuknya keembapaan yang mendukan yang penyelenggaaan RHL Terlaksanan dan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan RHL Terlaksanana RHL kerjatan RHL	 Data dan informasi kelompok masyarakat RHL swadaya 	- Tersedunya peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang pengelolaan DAS	Monitoring dan evaluass daerah rawan bencana alam (banjir, longsor, blofisik, sosek)	Pengembangan model rehabilitasi DAS Meningkatnya kemampuan teknis	ketembagaan DAS - Terpetharanya moderhutan rakyat kemitraan 6,000 na 6,000 ondel inti dan plasma); - Tersetenggaranya pemeliharaan hutan
			Pengembangan hutan rakyat di DAS prioritas	Penyelenggaraan penghijauan di UAS prioritas	Peningkatan kapasitas kefembagaan KHL	Identifikasi kelompok masyarakat RHL swadaya	Penysiana, penyembumaan dan sosalasa proturan perundang unda ajaan	Penyusunan rencana dan evaluasi pengeldaan DAS Prioritas	Pengembangan nodel rehabilitasi DAS Peningkatan kapasitas kelembagaan	Perseliharaan dan Pengamanan Hutan Rakyat
Keglatan Tahun 2009 Pokok Keglatan Tahun 2009 Pokok					Luas tananan Luniah bibri Luniah dibri Luniah dibri Romstan Luniah dibri Roms palatinan Kalifiza dan Kuantitas pekerjaan RHL di 33 Prpinsi		Draft RUU Konservasi dibhas Keugan stakenoleer terkart Ferstsunya review urutan prioritas DAS resediavya bahan kampanye tentang UMCCD an tersediagaranya peringatan Tahun internasional UNCCD			Torpelharanya model hutan rayat kemitraan 12,000 ha (60 model inti and plasma). Tersekengaranya pemeliharaan hutan
Keglatan Pokok	2				30. Pengembangan RHL Swadaya.		25. Pengelolaan DAS.			27 Pengembangan Hutan rakyat dan Hutan Tanaman Rakyat.
Fokus Kegiatan/Penanggung	Jawab Fokus				7. Retabilitasi Huzan dan Lahar Penangung Jawab (Dieckur Bina Retabilitasi Hutan dan Lahan, Ditjen RIPS)		B. Pengelolaan DAS Penangung Jawab Penangung Jawab Alran Sungar, Dipen RLPS)			13. Pengembangan Hutan Rakyat Penangung Jawab (Drekyur Bina Pehabilitasi Hutan dan Lahan, Dot,en
Sasaran	1	4			Terwujudnya kemanpuan dan peran masyarakat madan dalam upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHI) meningkat.		Terkendəlinya eros, sedimentasi dan banjır di DAS prioritas			Tercapainya penambahan hutan rakyat dan Hutan Tanaman Rakyat .
Ž					14.		15.			16.

] ·					
Rencana L. H. Alokasi - H. Pendanaan L. P. D. T. D. T. T. D. T. T. D. T.	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	<u> </u>	7		>	>		· ·
F. Ale		~	>		7	>	>	>
Penanggung" Jawab			Pelaksana Ditjen PHKA, Setjen, BALITBANG,	Ditjen BPK, BAPLAN.				
eluaran/Indikator	c keyes keelesz 200.000 h. o d. 2. monten zon. o d. 2. monten zon. T revelengalerune keelengalerune keelengalerune keelengan zon. o d. o.	Reienbagsan masyarakat dalam kegiakan RHI Tersengakanya areal model HR Temu Usha HR Remitraan Terhinanya kelempok tani Ha pasca deman	Menurunnya hot spot menjadi 0-10% dari tahun sebelumnya		 Diketahuinya kekuarangan dan kelebihan kegiatan dalkarhut 	 Terkendalinya kebakaran hutan 	 Meningkatnya kemampuan teknis petugas dalkarhut 	Terkumpulnya informasi bahan penyelidikan kasus kebakaran hutan
Keglakan (Indikator Sasaran) Keglatan Tahun 2009 Ke Pokok (Indikatan Pokok)		rakat HKM/HR,		Pemadaman dank dan udara di propinsi rawan (Kalimantan dan Sumatera)	Pelaksanaan evaluasi dalkarhut dan montloring perkembangan areal bekas kebakaran di 11 lokasi	 Operasional pengendalian kebakaran hutar DI 30 DAQPS 	 Petatihan 5 macam Penyegaran, TOT, Mekanik pompa, SPBK, Petatihan Dasar 	. Pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan) di 10 lokasi
E Indikator Sasaran Kegiatan Pokok	d 13 proping, and 14 proping, and 15 proping, and 16 proping,	Fernandracion (HRD) Francisco	 Meaurunnya hot spot menjadi sekitar 0·10% dari tahun 2006; 	Memingkartya patrisipasi masyarakat dalam masyarakat dalam pencegahan dan pencegaharan hutan di poronsi rawan kebakaran hutan; kebakaran hutan; Memingkartya kelembapan pengerdalan kebakaran hutan pengerdalar bepakaran hutan masyaran kebakaran hutan				
Keglatan Pokok			14. Pengendalia n kebakaran	hutan.				
Keglatan/Penanggung Jawab Fokus	RLPS)	S. P. A.C.S. E. G. G. D. G.	9. Pengendalian Kebakaran Hutan	Penangung Jawab (Direktur Bengerdalian Kebakaran Hutan, PHKA)				
Sasaran		his seel indanced	Terwujudnya pengendalian kebakaran hutan	yang etektif di Kalmantan dan Sumatera				
oN.			17.					

na st aan 15		->		7									
Rencana Alokasi ? Pendanaan 1.º	· >	·>		>	·	7>	· ·	· ·	>	·	~	 >	· ~
Penanggung Redicana Jawab A Aldikasi Pendanaan L						Otjen PHKA. BACLM. BALITBANG BALITBANG							
and the second	Berkurangnya intensitas pembukaan Tahan dengan cara membakar	Berfungsi sistem informasi dan deteksi diri bebabaran butan di	orni kegokarani huani ur tingkat masyarakat Meningkatknya Kesadaran masyarakat akari bahaya kebakaran hutan	Terbentuknya 10 regu Bridgalkarhut non Daops yang didukung dengan saptras pengendalian kebakaran	Efektifnya pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan di tingkat masyarakat	l'envojudinya Dit portgolaan nobanatif BAA (1.21) TH Model Dit TH Model mampu BAA melkskankan melkskankan pengalangan dana pengalangan dana Penantapan zonasi 21	Terbentuknya I unit TN Mandiri	Terbentuknya jejaring kerjasama dalam efektifikas pengelolaan kawasan konservasi di 7 TN Model	Efektifnya pemanfaatan 21 TN Model	Tersedianya Permenhut pedoman penyusunan Rencana Pengelolaan Tri	Tersusunnya rencana pengelolaan 3 TN Model	Mantapnya zonasi di 2 TN Model	Tersedianya data Informasi peluang pemandatan SDH di
3 - 1 - 1 - 1 - 1	ত		, ,					. 55				1	•
hun 2009	Pengembangan PI TB di 10 lokasi	Kelembagaan san Hutan	Pengembangan sistem informasi peringatan dni dalkarhut di 30 Daops (daerah rawan kebakaran hutan)	Pengadaan peralatan dan pembentukan Brigdalkarhut non Daops sebanyak 10 regu	Pembentukan MPA di 10 lokasi	Koordinasi percepatan perpelesan proses penetapan status pengukuhan di 21 Taman Nasional model.	Pembentukan 1 unit TN Mandiri	Peningkatan kerjasama pengelolaan kawasan konservasi di 7 TN model	Peningkatan pemanfaatan (penelitian, pendidikan, wisata) di 21 TN Model	Penyelesalan Permenhut tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan KSA/KPA/TB	encana 3 TN Model	onasi di 2 TN	omosi dan v Model
Reglatan Ta K	Pengembangar	Penguata <u>n Kapasitas Kelembagaan</u> Pengendalian Kebakaran Hutan	Pengembangar peringatan dini Daops (daerah hutan)	Pengadaan peralatan dan pembentukan Brigdalkarhi Daops sebanyak 10 regu	Pembentukan P	Koordinasi percepatan penyelesaian proses po status pengukuhan di Si Nasional model.	Pembentukan 1	Peningkatan kedasama pengelolaan kawasan ko di 7 TN model	Peningkatan pemanfaatan (penelitian, pendidikan, wr di 21 TN Model	Penyelesalan Permenhut t Pedoman Penyusunan Rer Pengelolaan KSA/KPA/TB	Penyelesaian Rencana Pengelolaan di 3 TM Model	Penyelesaian Zonasi di 2 TN model	Peningkatan promosi dan informasi 21 TN Model
AND THE STATE OF T		Peng		•		•		•					
Kegiatan V/Lindikator Sasaran Kegiatan Tahun 2009 Keluaran/Indikator. Pokok						a. Peningketan pengelolaan kawasan konservasi; Terwujudnya kelembagan pengelolaan kolaborati di 21 taman nasional model; b. Teidkesnanya pengembangan 3 TM dalam rangka DNS							
Kegiatan Pokok						12. Pengelolaan Taman Nasional.							
Sasaran Fokus Strategis Keglatan/Penanggung Jawab Fokus						10. Pengelolaan Kawasan Konservasi (Suaka Alam/Kawasan Alam/Kawasan Pelestarian Alam/Taman Bru dan Hutan Lindumg) Penanggung Jawab Penanggung Jawab Ditjen FHKA)							
Sasaran Strategis						Terbentuk dan Peroporasinya haroporasinya iaman Nasional model.							
2						83							

	Alokasi Pendanaana	7	· ·					7		7	>	>
Democratic	Jawab		Ditjen PHKA. BAPLAN, Setjen. BALITBANG									
Keluaran/Indikator		21 TN Model Pengelolaan 21 TN model efektif	 Disahkannya 10 Rencana Pengelolaan KPA/KSA/TB 					 Ditetapkannya PLG Kalteng menjadi KSA/KPA 	 Meningkatnya manfaat KSA/KPA/TB untuk kegiatan penelitian dan pendidikan 	Tertatanya zonasi di 10 unit KPA/KSA/TB	 Terbangunnya jejaring kerjasama dalam pengelolaan KSA/KPA di 15 lokasi 	 Tersedianya Data dan Informasi KSA
Kenjatan Tahun 2009		Penilalan efektivilas pengelolaan 21 TN model	Penyelesaian Roncana Pengelolaan di 10 KPA/KSA/TB					Penyelesalan usulan PLG Kalteng menjadi KSA/KPA	Peningkatan pemanfaatan KSA/KPA/TB untuk kegiatan penelitian dan pendidikan	Penyelesaian zonasi/ blok di 10 uni; KPA/KSA/18	Peningkatan kerjasama pengelolaan KSA/KPA di 15 lokasi	Evatuasi Pergelolaan KSA, 10 lokasi
Indikator Sasaran's	Strategis Keglatan/Penanggung Pokok Keglatan Pokok Jawab Fakus		Draft final revisi UUNo 5/90 - Tersedamya Pedoman (Standar, Kriteria, Proseduri/Jüklak/ Nuknis Proseduri/Jüklak/ Nuknis Progeluri/Jüklak/ Nuknis Tengelolaan KSA/KPA/	Rehabilitasi pada 100 unit kawasan konservasi dan hutan Induri 30%, kawasan konservasi 49º ticlah ditunjuk sudah ditetapkan Pemarifadari KSA/KPA/TB	Sebanyak 200 unit kawasan konservasi telah memiliki Rencana Pengelolaan dan zoning/ blocking Selesainya masalah	perigylinan Kasiyayi Be perigylina Kasapahaman kolaborati pengelolaan KSA/KPA/TB dengan masyarakat/ mitra Tersedanya database kawasan konservasi vano	when the para plant when the para plant plant when the para plant pl	ekosistem esensial				
Kediatan	Pokok		13. Pengelolaan KSA/KPA/TB									
Fokus	Keglatan/Penanggung Jawab Fokus		10. Pengelolaan Kawasan Konservasi (Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam/Taman Buru dan Huran Lindung)	Penanggung Jawab (Direktur Konservasi Kawasan, Dirjen PHKA)								
Sasaran	Strategis		Tercapainya Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan KPA/KSA/TB secara efektif.									
No			19.									

Rencana Alokasi Pendanaan	Q	7	->	· ·	>	>				7	~	'>	~	>	7	
<u>5</u>							Ditjen PHKA. Setjen. Ditjen RLPS, BALITBANG, BAPLAN								Ditjen PHKA Setjen, Ditjen RPS, Ditjen BPK, BALITBANG	
2009 Keluaran/Indikator Penanggung Jawab		Terbentuknya kolaborasi pengelolaan KSA	Tersedianya Data KSA yang terstruktur	Disahkan dan ditetapkannya 5 unit kawasan konservasi baru	Percepatan proses pengukuhan di 10 KSA/KPA/TB prioritas	Terlaksananya konservasi ekosistem esensial	Tersedlanya kriteria dan standar PHL		Tersusunnya tata hutan dan RPHL Kab/Kota/Provinsi	Pemahaman pengelolaan HL	Rencana pengelolaan HL lintas provinsi	Tersedianya kriteria dan standar evaluasi pengelolaan Hutan Lindung	Tersedianya data yang terstruktur	Data hasil evaluasi pengelola HL	Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan	
Kegiatan Tahun 2009		Fasilitasi kolaborasi pengelolaan KSA 5 tokasi	Pengembangan perdataan pengelolaan KSA 10 provinsi	Penilaian usulan 5 unit kawasan konservasi baru	Koordinasi percepatan proses pengukuhan di 10 KSA/KPA/TB priortas.	Konservasi ekosistem esensial	Penyusunan kriteria dan standar Pengelolaan Hutan Lindung		Fasilitasi, asistersi/bimtek penyusunan tata hutan dan RPHI	Sosialisasi pengelolaan Rt	Penyusunan Rencana Pengelolaan HL lintas provinsi	Penyusuhan kriteria dan stanutar evaluasi pengelolaan Hutan Lindung	Pengembangan perdataan Hutan Lindung, 5 provinsi	Evaluasi pengelotaan HI	Asixensi / bimtek peruembangan eko produkti bagi masyarakat di sekitar KK	
Indikator Sasaran (* 1808) Keglatan Pokok							- Lkkasi dan pedeman penacan hutan lindung								Permenhul/ SK Dirjen PHKA tertakan penyalahan penyalahan penyalahan Peryanga Penyalahan Peryanga kawasan penyanga kawasan konservasi yang befulinga menyala ketuthan kawasan	
Kegiatan Pokok							18. Pengelolaan hutan lindung.								29. Pengembangan daerah penyangah di sektar kawasan konservasi.	
Sasaran Fokus (Keglatan/Penanggung Jawab Fokus							10. Pengelolaan Kawasan Konservasi (Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam/Taman dan Hutan Lindung	Penanggung Jawab (Direktur Konservasi Kawasan, Ditjen PHKA)							10. Pengelolaan Kawasan Konservasi (Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam/Taman Buru dan Hutan Lindung)	Penanggung Jawab (Direktur Konservasi Kawasan, Ditjen PHKA)
46.0							Tercapainya peningkatan peringkatan efektifitas pengelolaan dan pemanfatan hutan lindung								Terwujudnya daerah penyangga kawasan konservasi yang berfungsi menjaga keutilian kawasan.	
2							20.								21.	

Rencatian M. Alokasi R. L. Pendananna											
A P	>	7	7	7	→		7	'>	7	7	
Penanggung Jawab					Ditjen PHKA, Setjen, BALITBANG, Ditjen RLPS, Ditjen BPK						
Keluaran/Indikator	UPT mengetahui/ memahani program & peleksanan program Pemberdayaan Masyarakat (PM) pada MDK dan derrah penyangga	Mengetahut permasalahan & kendala pelaksanaan kegiatan PM (9 tahapan) di sekitar Kawasan Konservasi	UPT memahami dan mampu mengembangkan program yang akan /sedang disosialisalkan terkait PM	Meningkatnya kompetensi/kapasitas pengelola dalam rangka PM sebagai fasilitator/ pendamping	Terlaksananya pembinaan habitat Jalak bali, badak dan owa jawa		Tersusunnya 2 strategi dan rencana aksi konservasi jenis Pelepasliaran satwa liar dilindungi	Data inventarisasi flora fauna di 10 lokasi	Terlaksananya pembinaan penangkaran dan peredaran TSL	Terlaksananya breeding program Badak Sumatera di Way Kambas	Strategi dan Rencana Aksi (Elang Jawa, Beruang Madu, Tapir, Babi Rusa)
an Tahun 2009	- Pembinaan pelaksanaan MDK	Money pemberdayaan masyarakat di sekitar KPA, KSA dan TB	Koordinasi dan sosialisasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat di sekitar KK	Peningkatan kompetensi pengelola dalam rangka penberdayaan masyarakat	Pembinaan Habitat		Pengelolaan Jenis dan Genetik	Inventarisasi Tumbuhan dan Satwa Liar	Pembinaan, Penangkaran dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL)	Recovery Populasi & Habitat TSL	Tersusunnya Strategi dan Rencana Aksi
Kegiat	Pembina	Monev p masyara dan TB	Koordina rangka p masyara	Peningka pengelol pembero	Permina		Pengefol	Inventarisa Satwa Liar	Pembinaar Peredaran Llar (TSL)	Recover	Tersusunnya Rencana Aksi
CLAST I	•		•	•							
Keglatan Tindikator Sasaran Keglatan Tahun 2009 Keluaran/Indikator Penangunig Pokok Keglatan Pokok K					Jurulah pedoman recovery untuk 4 Joris satwa Penambahan populasi badak sumatera 1 ekor, jahak bali SO ekor dan owa lawa 6 ekor	. Jumlah konflik menurun 5 % dari tahun 2007					
Keglatán Pokok					15 . Pengelolaan keanekarag aman hayati.						
Sasaran Strategis Kegiatan/Penanggung Jawab Fekus					11. Pengelolaan Kaanekaraggaman Hayati dan Produk Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL)	Penanggung Jawah (Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Ditjen PHKA)					
1.00					Tercapannya pengelolaan SDAH secara lestan.						
2.0					22.						

Tendanaan:	7	7			7		7	·7	7	7		·	
dewel Sawaling		Ditjen PHKA , Setjen, Otjen RLPS.									BAPLAN	Ditjen BPK, BALITBANG, Ditjen PHKA, Setten, Ditjen RLPS	
	Terlaksananya pembinaan pada 5 LK dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan	Audit unit penangkaran komersil 1SL Perluasan usaha budidaya dan penangkaran coral,	adaharu dan reptil Selesaniya review pasal 11 pp 8/1999 (Status perindungan TSL hasil penangkaran)		Diversifikasi produk TSL	Tersusunnya pedoman penetapan sistem pemanfaatan kuota	Terbinanya masyarakat di daerah kawasan konservasi	Peningkatan ekonomi masyarakat sekitar KPA dalam wisata alam	Meningkatnya kesadaran Kader Konservasi	Peningkatan ekonomi masyarakat sekitar KPA dalam Jasa lingkungan	- Penylanan bahan	tahun hasil u 30 atik telah	tersinkronisasi dengan
Indikator Sasarah Programman anun 2009	Penyelamatan Satwa Liar & Pengembangan Konservasi EX- Situ	budidaya dan penangkaran TSL			Pengembangan Froduk Hilir TSL & Penngkatan Nilal Tambah		Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan	Pengembangan Pemanfaatan Wisata Alam	Pengembangan 8 na Cinta Alam			data dan informasi SOH	
ndikator Sasaran Kegiatan Pokok			(TSL) dan jasa liniqkungan 2% dari tahun 2008; Penniqkatan penyerapan renaga kerja pada TSL dan pada pengelolaan Jasa inigkungan/wisata alam sebesar 2% dari tahun	Victorial department of the control				d A		g .	Name of the last o		remanakan teknonyi penginderaan jauh dan
Keglatan Pokok		19. Pemanfaatan produk TSL, Jasa Lingkungan dan Wisata										1. Inventarisasi dan Perpetaan SDH.	
Fokus: Keglatan/Penangung Pokok Jawab Fokus		12. Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	Penanggung Jawab (Oirektur Pemantaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam, Ditjen PHKA)								kses antormants DA Han Li	17. Pengembangan Sumberdaya Hutan Sumberdaya Hutan Penanggung Jawab (Kepala Pusat Inventansasi dan Perpetaan Kehutanan, Baplan)	
Sasaran Strategis		Tercapainya peningkatan pemanfaatan TSL dan Jasa Lingkungan dan Wissa Alam	secara optimal.								Trans. Poningkatan a	Tersedianya data dan Informasi sumber daya hutan (SDH) serta informasi lokasi pemanfakan hutan di selumb Indonesia	yang lebih berkualitas (akurat,
Ž U		23.									e Loc	Ħ.	

Alokasi) Pendanaan		7	· 'pe	7	7	7	**	· '*
Penanggung Jawab								BAPLAN, Ditjen BPK, BALITBANG, Ditjen PHKA, Setjen, Ditjen
Yeluaran/Indikator (Penanggung Jawab	data dasar sebanyak 300 lembar (2 tema) Inventarisas hutan nasional; Pembuatan NSOH; Pengembangan sistem jaringan informasi kehutanan di 17 propinsi; Penyiapan implementasi REOO	Rondisi dan perubahan perutugan hutan pertensi SEDH utan pertensi SEDH utan dan tekanan tehadap KH termonitor Terwojidinya komunikasi dan sebasahan transportasi dara spadan Deerah	Tersedianya data dasar dan tematik kehutanan spasial dan non spasial vg akurat Data digital peta dasar tematik kehutanan skala 1 : 100.000, 750 lembar	 Pengelolaan data spasial kehutanan dilaksanakan sesuai peraturan yg berlaku di 33 propinsi 	Buku NSDH Daerah/Prop 30 judul dan nasional 1 judul Tersedianya data SDA	 Data potensi tegakan hutan dan sosial budaya masyarakat di dalam dan sekitar hutan 	Tersedianya peralatan perdukung serta peralatan dan mesin dalam dan mesin dalam peralatan dan mesin dalam tersedianya database ctra dan berbagai kahur dan resolusi kahur dan resolusi	 Tersedianya sarana komunikasi data dan sistem assesment data dan informasi kehutanan di pusat &
Kèglatan Tahun 2009		Peryusuran dan pengkajan basis daka SDH spasial dan non spasial	Pembuatan, pengadaan dan penyempumaan data dasar tematik kehutanan	Pengaturan pembakuan dan penggunaan peta-peta kehutanan	Penyusunan NSDH	Inventarisasi SD4 dan sosial budaya	Pemandatan teknologi mdenaja dan STG	Pengembangan sistem dan Infrastruktur SIAPHUI
Kegiatan Pokok	sistem informasi geografi dalam pengelolaan data gasala tematik kehutanan Pengembangan sistem janngan informasi kehutanan di 17 provinsi.							Terintegrasinya data dan informasi spasial-non spasial lusat-daerah Jaringan LM Pusat berfungsi balk dan akses
-								2. Pengembangan Sistem Informasi
Keglatan Penanggung Pokok Jawab Fokus								17. Pengembangan Sumberdaya Hutan Penanggung Jawab (Kepala Puset Inventarisssi dan
Not Sasaran Strategis Ke	mutakhir, dapat dipertanggung- jawabkan) sebagai bahan pengambilan kebjakan pengelolaan hutan lestari.							Tersedianya data dan Informasi sumber daya hutan (SDH) serta informasi lokasi
9								25.

Rencana A		· ''	2	77	· · ·
Penanggung	RUS				BADLAN SHIPIN Duton PHIKA, Digen R.US, Deten IBK, BALITSANIG, Iţen
Keluaran/Indikator	di daerah va kerungkan kerungkan kerungkan data kerungkan data penangkan data datan merdikuan dalam merdikuan Data spisal terutak kerutanan yang akura, kompetensil kerutanan yang akura, kompetensil proprins) Tersedanya infrastuktur sistem proprins) Tersedanya infrastuktur sistem proprins prokembangan pusah dan daerah sekulan perkembangan sekulan perkembangan sekulan perkembangan	Revictorian programme of the control	Data informasi tersaji dalam berbagai kesempatan dan pelayanan ngelayanan ngelayanan pada website Dephut tersaji mutakhir	Buku laporan data dan informasi kehutanan kerjasama dengan BPS, 1 judul	Dechut the 2010 Replace Essen I den UPT Dechut the 2010 Remain dark the 1984 Dechut the 2010 Remain dark the 1984 Dechut the 2010 Dec
Keluaran/Indikator Sasaran Kegiatan Tahun 2009 Keluaran/Indikator Peranggung Kegiatan Pokok		Penyukunan Statistik Kehutanan dan lingkup Baplanhut	Penyajan dan pidayanan data informasi SUH, serta penyajian data dan informesi terkini	Penyusunan dar penyediaan data dan informasi kerjasama dengan BPS	Penyusunan rengana-rengan pembangunan kehusanan
Keglatan Pokok	internet lancar. Buka Saratah Kephut, Buka Saratah Kephut, Buka Saratah Kehutan Organ Saratah Dahan Informasi Kekutanan Buku Ekecalif data Buku Sahasil Bikir ya Buku Sahasil Bikir ya Data informasi hasil Kerjasama dan Bi-S				Reitja-Kt. (2007 et Al.; RPJP Kethustonn nada eetago unit organisasi terseda Araban Rericana, Araban Rericana, Araban Rericana, Araban Perroksarin din pulan pulasi keri lerinur tersedia Kehija an Hembu tik Kehigan Kehudanan Rericana kehudanan dikedauli para pilak, diduduni sepulanan dikedauli para pilak, diduduni sebudahan kominen kehudanan
ig (Pokok	Assessment Assessment Perhapsyment (STAPHUT)				16 Peryusunan Rencana Kehutanan.
Keglatan/Penanggu Jawab Fokus	Perpetaan Kehutanan, Bap				PENDUKUNG
Sasaran Strategis	est e sa				Tercenjulding Kehidanan yang menjad acuan menjada acuan dalam implementasa dalam implementasa pembanginan kehidasan dan sekior laim
O. Marie					29

Rencana 3 Kalokasi 2 Kalokasi 2 Kalokasi 3 K		~	7>	77	7	'>	***	79	
1.5									ETIEN STELLEN SETTEN STELLEN S
Keluaran/Indikator Penanggung	pembagunan kentranan wilayah perbatasan dan pulau- pulau kecil terluar	 Draft Rencana Kehutanan Tingkat Nasional 	Kumpulan naskah proses desentralisasi kehutanan	 Publikasi rencana kehutanan dan kawasan hutan 	Laporan hasil monev pelaksanaan rencana pembangunan dan rencana kawasan hutan	Implementasi komitmen internasional bidang perubahan iklim	Buku PDRB Hijau	 Konsep perencanaan wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota 	Display a Allagora (New York) Terfaultasiny a Set on the Control of the Control
Kegiatan Tahun 2009		Penyusunan rentana makro kegiatan kehutanan dan Rentana Kehutanan Nasional	Fasilitasi rencana pembangunan kehutanan dan desentralisasi	Sosialisasi rencana-rencana kehutanan, standar-standar dan kebijakan pemantapan kawasan hutan	Monitoring dan evaluasi rencana dan peleksanaan kebiskan, program, kegiatan dan kinerja pembangunan kehutanan	Pengembangan «emitraan dalam rangka perubahan iklim	Penyusunan PDRB HIjau	Fasilitasi perencanaan wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota	girk skriffelb brangskriffelbrangskriffelbrangskriftelbra
Tindikator Sasaran {} Kegiatan Pokok	action international dan menjadi action in Logiscal reductor dan revolutional residence dan revolutional residence dan revolutional residence dan Resident Maker kewasan Residenta Maker kewasan Resid						•		Terrediente (2005) Terrediente terredient
Keglatan Pokok									22. Pengembin Sengembin Sentanan.
Sasaran Fokus Keglatan Tahun 2009 Keglatan Tahun 2009 Strategis! X. Keglatan Pokok (Pokok (Jawab Fokus									Ferriginal Park Red
No Sta									######################################

Rencana H. P. Alokasi Pendanaan P		**	**	· *		·7	7		×	7	7
							BALITBANG, Ditjen RLPS, Ditjen PHKA, Ditjen BPK	Setjen, BAPLAN,			
Keluaran/Indikator		Terfasilitasinya pendidikan 52 : 185 orang dan 53 : 34 orang	Terselenggaranya dikiat prajabatan gol I/II: 750 orang, dikiatpim II: 10 orang, dikiatpim III; 80 orang, dikiatpim IV: 160 orang	Terselenggaranya diklat teknis kehutanan bagi 4.000 orang	Terselenggaranya diklat fungsional kehutanan bagi 600 orang	 Terselenggaranya diklat teknis kehutanan bagi 1000 masyarakat 	100% Paket IPTEK kelembagaan pengelolaan hutan	alam produksi lestari	 100% Paket IPTFK pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan/lahan kritis 	 100% Paket IPTEK pengelolaan hutan tanaman 	100% Paket IPTEK Pengelolaan kawasan yang dilindungi dan
Indikator Sasaran Keglakan Tahun 2009 👙 Ketiałan/Indikator 💮 Penanggung Keglatan Pokok		Fasilitasi pendidikan S2 : 185 orang dan S3 : 34 orang	Penyelengunaan diklat prajabadan gol III. 250 orang, diklatim III. 10 orang, diklatim III. 80 orang, diklatim IV. 160 orang	Penyelenggaraan diklat teknis kehutanan bagi 4,000 orang	 Penyelenggaraan ciklat fungsional kehutanan bagi 600 orang 	Penyelenggaraan diklat teknis kehutanan bagi 1000 masyarakat	Lithang velembagaan Lithang velembagaan Pergebolaan hutan alam produksi kelembagaan lestari pengelolaan hutan alam produksi pengelolaan hutan lestari		Litbang pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan/lahan kritis	Litbang pengelolaan hutan tanaman	 Litbang Pengelolaan kawasan yang dilindungi dan pelestarian kcaneka ragaman hayati
Indikator Sasaran Keglatan Pokok	masyarakat (non - aparatu) Memingkatnya kemampuan hemagakatnya kemampuan lenapa kedikana dalam penyakengaran bikat kedikanan dalam penyakengaran bikat kedikanan bikat kemuanan bikat penyelengaran bikat penyelengaran bikat penyelengaran bikat kebutuhanan							dengan balk			
Keglatan ggung Pokok is							<u>PETOGTA INJECTION (FIRE TO THE PETON OF THE PETON OF TO THE PETON OF THE PETON</u>	gan Kehutanan.			
No. 1. Sasaran. Fokus E. Kegiatan Kegiatan Kegiatan Penanggung Pokok Jawab Fokus							janidan) kengembangan il a PENDUKUNG utanan	a Le			
No. 1 Sasara							REFOGRAMISS E SE	yang menjada acuan pembangunan nasional.			

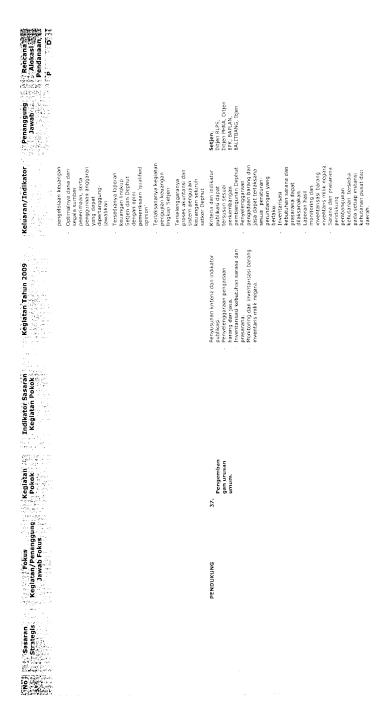
Alekasi Pendanaan.		7	•	4	2	,			,	-		
Jawas								Polabsene BALTBANG, Setjen			Setjen, Dices RJS, Ditjen	THER BOYCAN, DIÇUR BRY
	ragamen hayald	100% Poket JPTEK Kajter Pengambengan Sesai Fanestry	100% Poket IPTEX Ferlegatan Eudidiya HHIK urb.ix mendukung asaha kebil menengah	200% Paket IPTEK Tekne ekonomi permetkedon hasil hutan	- 100% haket timter. Pernashaban dan pernasaran jasa hutan	- 100% Paket IPTEK Bestog huben den sifet deser had huben	100% roke trtek Pemerapan kelembapan sektar kehudahan	Penyalengarnen Geler Teknologi Ekspesel Sentere hast Litteng	Penyusuran dan Penerbian Jamai Hesi Usteng	Kerjarama Lithang dengan mitro DN dae LN		Regulate for demandard pergetation states of the pergetation states of the pergetation of the percentage of t
	The state of the s	Libang Kajan Pengembangan Sosial Forestry	Libang Peringkaban budidaya Hilik ubuk mendakang usaha keci menengah	- Utbang Tekno dkations per anfaster has flutan	- Littano Pertentantan den perresaran jasa hutan	- Lithang Biologi hulan dan sifat. dasar hasi hutan	- Litharq Pemeriapan kelembajaan sektor ketutanan	- 100% Deemined heat, kerjanama dan Jajanny Kerja Libang	100% Perencanses, pernarbasen Noteringpen der evolucki Lithang	. 100% Secare dar Prasarana Lithang	Pervalunzo dan pengembangan Informati	Pervusarian peraturan bestaria. penyakhan sebusarian. Pengelakhan Hit. Pengelakhan Hit. Pengelakhan Hit. Pengelah Hit. Pengelah Hit. Pengelah Hit. Pengelah Hit. Pengelah pengelah pengelah pada heripatan pengelah pada heripatan pengelah pada heripatan pengelah pada pengelah pada pengelah pada heripatan pengelah
Keg stan Pokok								Penarfasta IPTB nasi Litang Litang Litang Registan Litang Territognas Samon dan prawana Litang menadai			SINCON SERVICES INC.	
Pokok								21. Statem penungang kalibangan dan penerajan penerajan hasil libang	- Constitution		23. Pengenhan	gen gesyddiban hehutassn,
Keglatan/Penanggung Jawab Fokus								PENDURING			PENDUKUNG PENDUKUNG	
Strategis											20. Terselenggara	pervuluian kehitanen
Ž.											20.	

Rencana 432 Alokasí 233 Pendanaan 333 p f T D 33								
100								
Penanggung Jawab		Setjen. Ditjer BPK. Ditjen PHKA. BALITBANG						
ndikator	dalam an neningkat.		rancangan disk dan gar acuan gar butan hutan s produksi an hasil	o data Standar di	ya kualitas upilan SDM ahaman si dan	ya n para pihak aya n mutu dan oroduk	ya yn para ndar	ı data /HT dan ıt yang siap
Keluaran/II	kehutanan Keterlibatan - masyarakat dalam pembangunan kehutanan meningkat.	resedator data sebagai datar penyusunan RSNI	Tersedianya rancangan standar produk dan proses sehaga acua dalam proses pengelolaan hutan serta proses produksi dan pengujian hasi hutan	 Tersedlanya data penerapan Standar di lapangan 	 Meningkatnya kualitas dan keterampilan 5DM dalam pemahaman standardisasi dan sertifikasi 	Meningkatnya pemahaman para pihak terhadap upaya peningkatan mutu dan daya saing produk	Meningkatnya kapasitas dan ketrampilan para	Tersedianya data IUPHHK-HA/HT dan Hutan rakyat yang siap
n 2009	ım Indonesia nam besar	ue se	tanan tanan	dan	i dan	dardısasi dan	nıngkatan ıtan	manajemen utan rakyat
Keglatan Tahu	masyarakat Pengembangan program Indonesia menanam, kecil menanam besar memanen.	Pembinaan standarrasu dan Ingkungan Orientasi Produk/Proxes	Penyusunan RSMI poduk/proses barang dan josa ke rutanan	- Pemantauan Evaluasi dan Penerapan Standar	 Pelatihan standardisasi dan sertifikasi 	 Sosialisasi sistem standardisasi dan serufikasi 	 Satari penyegaran/ peningkatan teknis penguji hasil hutan 	. Evaluasi Kesiapan unit manajemen IUPHHK-HA/HT dan Hutan rakyat
Indikator Sasaran Kegiatan Tahun 2009 Keluaran/Indikator Penanggung Kegiatan Pokok		Co produk hannanyjasa Shandar hashanayjasa Shandar hashan il noonesia Shandar hashu maupun halfa bikan kayu maupun halfa bikan kayu maupun halfa bikan kayu maupun pengelolaan hannan dan jasa Tingkungan menentin sandar (SNI) halfa dan halfa sandar (SNI) pengendalah ingkungan di 20 lekasalan ingkungan di (propinsiykabupaten/kota)						
Keglatan Pokok		Standariassi Produk Basang dan Jasa Kebutanan.						
eglatan/Penanggung Jawab Fokus		PENDUKUNG						
No Sesaran Fokus Keglatan Kajaban/Penanggung Pokok Jawab Fokus		ŭ.						

Alokasi Alokasi Pendamaan B				1110101010101010101010101010101010101010	
Penanggung			Section Distance R.P.S. Dotter BAPLAS, BALLTEANG. Then Then	Serjen Marian Diten Rufe, Diten Pres, Diten Sirk, BallTBani	Setjen, Ottjen RLPS, Ditjen PHKA. Ditjen BPK, BAPLAN, BALITSANG, Itjen
Keluaran/Indikator	untuk sertifikasi	Terciptanya akerunikasi antara sakerunikasi antara sakerunikasi antara sestiah kergalahan pembangunan yang sakelau memperimbangkan memperimbangkan Tersesianyan dasa kerunikasi Ingikungan kawasan lutan dan sekilamnya hutan dan sekilamnya dasa dan keterempilasi Semitasi Ingikungan	briederun perundangan bidang kebapatanan hadang kebutanan beradangan beradangan bidang berutanan perundangan bidang berutanan din rangka perundanan din rangka perundanan diperundangan berutanan diperundangan deresikan beradangan dera berutanan diperundanan	Required dan deregulasi Regulasi dan deregulasi pembangunan pembangunan Produk Pukeun Produk	- Tersusumme DIPA Tahun 2009
Kegistan Tahun 2009		Koordinasi pengendalan kerusakan Ingamajan ningan haran kerusakan Ingamajan ningan Ingamajan ningan dan Penter pengelaan dan Penter pengelaan ingamajan Peterban lingkungan Peterban lingkungan	Pembesan hukum dan organisasi - Renyusunan / penyem-pumaan kebigkan / penaturan perundanyan bidang kebutanan	Fernusiunan dan periyempurnaan perakuraan dibodan (desertaliasi perakuran limetimisisi perakuran perundanjasi perakuran perundanjasi perakuran perundanjasi perakuran desertaliasi ketertuan desertaliasi den den perundan perundangan kerutanan serakuran perundangan kerutanan desertaliasi kerutanan dengan kerutanan dengan kerutanan perundangan kerutanan perundangan kerutanan dengan	Pengembangan perencanaan dan administrasi keuangan - Penyasunan rikalah DIPA Tahun 2009
Ind'kator Sasaran Kegiatan Pokok			Kegelann kernlannen dapak keriskennen dan levcen ditunjang perekuran perundang-undangan		Tersedianya data dan informusi mengenal DIPA BA. 29 tahun 2009 Terpenuhinya keperluan standar biaya kegistan
Keglatan Pokok			32. Perubinaan hukum dan peraturan perundanga n.	33. Desertrafisms kehutanan.	34, Pengembangan rencana dan penganggaran penbanggaran kelestanan
Keglatan/Penanggung Jawab Fokus			PENDUKUNG	PENDUKUNG	PENDUKUNG
Strategis			Tercepatings Percepating disam disam disam persongplangan persongplangan persongplangan persongplangan persongplangan persongplangan	Tercapatrya Gesentralisasi pembanguahananyani ketulahananyani meningakan hasigi pikeraan hasigi pikeraan pelestanan hutan.	Tersedianya dana, sarana, prasarana, yang propersional untuk mendukung pembangunan

	<u>a</u>					
Kasi						
Alor	<u> </u>					
	<u>.</u>					
Salarana (
5						
ap						
Jay						
Č.	9					
è			u o .	5	¥	e
katı		ake 10 10	okum 200 N P) atker	an tahu	han Deph	ucau.
P.		Tersusunnya buku Iaporan mengenai IHSBK tahun 2010	Tersusunnya dokumen anggaran tahun 2009 (BA 69 dan APBN P) untuk seluruh satker	Data penyerapan anggaran BA 69 tahun 2009	Tersedianya bahan nota keuangan Dephut 2010 lingkup Dephut	Tersusunnya rencana
) ua		sunn su me	ran t 9 dar selu	peny iran B	dian	Sunr
luar		ersu apora HSB	Tersumgga BA 6 Intuk	Data Ingga	Terse note l	Tersu
ā.				,		,
			Penyiapan dan penyusunan dokumen anggaran tahun 2009 (BA 69 dan APBN P)	g.	neg	Penyiapan dan penyusunan rencana
600		Penyusunan IHSBK tahun 2010	2005	Rekonsiliasi penyerapan anggaran BA 69 tahun 2009	Penyusunan bahan nota keuangan Dephut 2010	n ren
E		Į.	suna	e ue	ota k	suna
Į.	•	ξ t	enyu ran t	yerap)9	Ę	S,
E		THS.	dan p ngga N P)	n 200	had t	d uel
giat	•	Suna	par: (nen a n APB	siliasi tahu	sunar t 201	pan
ā		SO A LE	Penylapar: dan penyusunan dokumen anggaran tahun 2 69 dan APBN P)	ekon: A 69	enyus	enyia
		ă.	9.00	v. m		ď
42000						
Eu	ingkup Dephut dolam malekukan perencanaan malekukan perencanaan Terbutukan dekumen anggaran A					
sara	lam anaa anaa anaa anaa anaa anaa anaa a					
San P	with day of the control of the contr					
ato	Deph a dol a dol a dol a dol b en a dol a					
Keg	melkukan perencanaan melkukan perencanaan melkukan perencanaan Treptukan dokumen anagar Agejatan Asebe- dan Na Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab Ba					
.	A A Present Transfer of the Present					
cok						
Pol						
1922 A	•					
25 E						
inge kus						
kus Jens						
Fo wat						
giatt						
्ड						
Historie I Hospital						
(*) Sasaran (*) (*) Fokus (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)						
Sasi	Kehutanan					
	kehut					
2000	, 					

Penanggung Rencana S. Jawab Alokasi Jamab Pendanaan S. Pe								Setjen,	Ditjen RLPS, Ditjen PHKA. Ditjen BPK,	Balltrang Balltrang		Setjen, Ditjen RLPS, Ditjer PHKA, Ditjen BPK,	вандам, ваштвамо. Треп.	
Keluaran/Indikator	anggaran tahun 2010	. Tersusunnya RKA-KL tahun 2010	- Tersusunnya DIPA/SRAA Dephut tahun 2010	. Bahan rapat kerja DPR dan dengan instansi terkalt	Tersusunnya materi- materi raker dan rakor Tersusunnya satuan 2 dan satuan 3 serta RKA-KL Dephut sementara	 Laporan akuntabilitas kinerja lingkup Dephut dan Setjen 	Laporan hasil monev dan rekomendasi pelaksanan kegiatari dan anggaran pembangunan kehutanan Ingkup Setjen dan Dephut	. Usulan kegiatan	Pembangunan Kehutanan Provinsi	tanun ZO10 hasil Rakorenbanghutda • Usulan kegiatan pembangunan ketutanan Regional tahun 2010 hasil Rakorenbanchitzen	Rekomendasi pengeloban hutan kepada Unit Eselon I Laporan hasi pemberan binibingan, pemantauan, dan penantauan, dan evaluasi serta rekomendasi tindak lanjul	- Tertib administrasi pengelolaan keuangan		Torred language
Kegiatan Tahun 2009. Keluaran/Indikator	tahun 2010	 Penyiapan dan penyusunan RKA-KL tahun 2010 	Penyiapan dan penyusunan DIPA/SRAA Dephut tahun 2010	 Penyusunan bahan rapat kerja DPR dan dengan instansi terkait 	Koordinasi perencaisaan anggaran pembangunan kehusarian tahun 7010	- Penyusunan Lakip	Montoring dan evaluasi pelaksanzan kepiatan pembangunan kebutanan	Pengendalian pembangunan	kehutanan	Koofdinast dan sink-orisasi Perencranaan permbangunan Kehutaan provinsi dan regional Koordinasi dan silk-orisasi pengelolaan hutan regional Pemberan biribingan penankauan dan paulasi pembangunan	kehutanan Regiona	 Penataan pengelolaan dana Kehutanan Pelaksanaan anggaran dan 	perbendaharaan Optimilisasi penerimaan PNBP kehutaian Akuntanai dan veniikasi laporan keuangan	
Indikator Sasaran Kegiatan Pokok								Rencana pembangunan	kehutanan provinsi dan regional	- Nekonordasi Kebada Unit Eselon I dalam pengelalan hutan di tingkat regional		- Terpenuhinya dana untuk mendukung rencana pembangunan kehutanan	 Felaksanaan anggaran dan perbendaharaan Optimalisasi penerimaan PNBP kehutanan 	
Fokus Kegiatan Indikator Sasaran S. Kegiatan Pokok Jawab Fokus								PENDUKUNG 35. Penguatan	koordinasi dan	sinkronisasi pembanguna n kehutanan regional.		PENDUKUNG 36. Pengembangan pengelolaan keuangan.		
Sasaran Strategis														



Rencana Albasi Erres Pendanaan	V										
Penanggung Jawab	Setjen , Düğen R.P.S, Ötçen PHKA, Ötçen BPK, BAPLAN, BALITBANG										Setjen , Ditjen RLPS, Ditjen PHKA. Ditjen BPK,
Keluaran/Indikator	Tersusun dan tersebarnya 200 siaran pers dan informasi laninya.	- Tersusun serta terbitnya beberapa produk informasi kehutanan	Terwujudnya cetak foto dokumentasi kegiatan kehutanan.	 Tersosialisasikannya beberapa kebijakan Dephut kepada seluruh stakeholders 	 Tersediannya perangkat dan system multimedia interaktif Dephut 	Laporan sosialisasi Kebakan Deputr Kepakan Deputr Kepada LSM, ormas asosiasi, PT, Pemda, UFT di pusat dan daerah daerah Tersedanya perangat dan sistem multi media interakti Deput		 Terfasilitasınya penanganan aspirası masyarakat 	Laporan pertemuan dengan para pihak tentang kecenderungan opini Publik	Terbinanya pengembangan informasi kehutanan di daerah (Prop/Kab/Kota)	 Regulasi dan deregulasi pengembangan organisasi dan
Kegiatan Tahun 2009	referengarand perubnaan referense publik Pembuatan dan penyebarluasan raasah saran pes dan informasi larinya di pusal dan daerah	Penyuluhan dan penyebaran informasi Penyusunan dan penerbiran naskah informasi kehutanan.	 Publikasi dan dokumentasi berbagai kegiatan berkaitan informasi kehutanan 	 Sosialisasi kebijakan Dophut kepada seluruh stakeholders 	 Pembentukan/penyadiaan jaringan informasi interaktif terkait kehutanan 	- Kampanye dan penyebaran Intormas	Pengembangan pemanfaatan jaringan komunikasi pusat dan daerah	Penanganan aspirasi masyarakat	 Pertemuan dengan para pihak tentang kecenderungan opini publik, 	- Pembinaan informasi ketuutanan daerah	Pengaturan pengembangan organisasi dan tata laksana instansi kehutanan di pusat dan daerah.
Indikator Sasaran Kegiatan Pokok	Adanya dikungan dari para phak	Menngkatkan pemahaman para pihak kebijakan dan pelaksanaan program di bidang kehutanan				Tersedianya daka dan informasi bagi para pihak di bidang kehuranan	Terwujudnya pertemuan/sosialisasi/dial og dengan para pihak				Dokumen rancangan Tahubja Departemen Kehutanan
Fokus Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan/Penangung Pokok Kegiatan Pokok Jawab Fokus	38. Pengemban gan mai informasi kehutanan.										39. Pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan.
Fokus Keglatan/Penangg Jawab Fokus	PENDUKUNG										PENDUKUNG
Strategis											

Penanggung Rencana (1)	整数理 (2015) 通過 (2015)		
Penanggung	BAPLAN, BALITBANG, Tyon.	Serjen Jogo Mykk, Digen V. Digo Mykk, Digen M. Lifakin M. Lifakin	Setjen, Drigen Rir S. Drigen PRKA, Drigen BK, BAPLAN, BALITBANG, Jijen
Keluaran/Indikator	ketatalaksanan. Organisas dan ata Auksana institusi kehutanan prest dan daerah berjalan efekti dan responsif sesual turtutan pembanguan tindahan disemua	Terselengananya Eliteraha Repeterahan Eliterahan Bulkana Eliterahan Dirandsananya Resepakatan Dirandsanania Derbukanan Eleturahan	Data ketersadiaan, kerpersadiaan, kerpersadiaan, kompetensi SDM (milk) asamilisi Gender dan analisis Gender dan analisis dender dan ensitias pendidakan dalah tada netalah dalah tada netalah sertata 90 anan Penningkatan Prefes
Kegiatan	Monitorny dan evaluas efektifas Organissa institue den anda Penylajian organissa losaan Kerularan di pusta dan decela Kerularan di pusta habungan kerja institusi kehutanan di setap	Pergogution kerpasian blateral dan mutilateral indend detentionen. Pervyedenggaran kerpasana Liar negeri bilateral indendenda bur negeri bilateral dan PBB. Pengaluran kerpasana buar negeri mutilateral dan PBB. Pengaluran kerpasana dan dikungan internasional dan dikungan internasional dan keryedingaran kelemban dan keryadingaran kelemban dan	Pengembangan SDM dan acmmistrasi kergawalan Pengkajan penyapan SDM utk menjawab bantangan ke depan kepagawalan dan pengenhangan kepagawalan perencanaan kepagawalan
Keglatan Indikator Sasaran Pokok Keglatan Pokok	Terbenniknya organisasi Eselon 1 Dephu yang efekti, produkti dan responsif		Percentation pegawal
11 1		40. Pergembargan kerjasanan kerjasanan kerjasanan perjasanan pergebaranan pebaranan, kehudanan, kehudanan.	41. Pongelolaan SDM Kehutanan Besetaraan gender.
Fokus Keglatan/Penanggung Jawab Fokus		PENDUKUNG	PENDUKUNG
No Sasaran Ferri Strategis		Peran aktr Indonesia dalam Litaran global budany kehutanan Karan Soshi serta Karan Soshi serta Karan Soshi serta Berkontibusi roseliy bada pembanguan kehutanan nasional	Terwultriya SDM Kehutanan yang berkalata yang berkalata sera kemperana proporsyonel
2	: 	.	84

	Pendanaan											** **	-			
Penanggung Jawab			Kirker Character Date BPA, Settler Date BPA, Settler Date BPA, Settler BA Settler BANG													
Keluaran/Indikator		pengurusan kepegawalan	Trestedany & Laporan (7 Japoran Departemen) 1 Japoran Departemen)	 Meningkatnya pemahaman 180 auditor Bawasda Prov/kab/Kota tentang SAK 	Pemahaman tentang Jakwas di 20 Provinsi	- Kesepakatan PKPT di 33 provinsi	- Tercernatinya 5 Laporan Evaluasi	 Dukungan satker di 33 Provinsi 	Peningkatan kualitas 180 PNS	- Tersedianya 50 LHA, 10 IMA, 180 LHA	 Progres hasil tindak lanjut 	Pengembalian kerugian negara	 Terlimpahkannya berkas kasus 	 Pengembalian TGR dan TP 	- Tersedianya 40 LHA	Tersedianya 20 bukti dan keterangan
Indikator Sasaran Kegiatan Pokok		pengurusan Kabilalin - Kaningkatan RengeWasan tahun Adma bilint Kanaran in Montan	Pervyelengarian pengawasan den penrerissan aparatur negara (Jinternal) - Evaluasi SAKIP 8.5A1	· Bimbingan Teknis	· Pembinaan Wilayah	. Rakorwas	- Pencermatan	- Sosialisasi	Diklat Peningkatar kualitas SDM	 Audit Kinerja, keuangan, operasional 	- Pemantauan Tindak Lanjut	- Pemutakhiran data Tindak lanjut	 Pelimpahan Kasus yang berindikasi Tindak Pidana 	- Monitoring sanksi	· Audit Khusus	 Pengumpulan Bahan dan Keterangan
Indikator Sasaran Kegiatan Pokok			Ratio jumith regulation for Jumish Verbedulah aratio juminh regulation aratic aratio juminh regulation aratic and puminh remain per and puminh remain per and for formation aratic and a formation are aratio sea ternary aratic such affordase langup per and elimitation a lengunan and puminh remain aratic and the formation aratic and the formation aratic and are formation aratic and are formation aratic and are formation are and are formation are and are formation are and the formation are and and and and and and and and													
Kegiatan Pokok		tas Abara (newenara)	42. Pernyelenggar Pernjawasan Aparatur Negara													
Fokus Kegiatan/Penanggung Jawab Fokus		n. Pengawasan makan kuntabil	Pendukung													
No Sasaran Strategis		Ricordinaszeringkata	35. Teterinturvie ens Kehtaren varg dopt merjaaikan ugas secrat bern keternan den keternan den kempetensi-nya													

Rencana Alokasi Pendanaan P D			
Penanggung Jawab			
Keluaran/Indikator	Tersedianya 10 Informasi	Tersedianya 200 hasti analisis	Tertampungnya 230 pengaduan masyarakat
Kegistan Tahun 2009	· Intelejen	- Penelittan dan analisis kasus	Penanganan pengaduan masyarakat
Indikator Sasaran Kegiatan Pokok			
Keglatan Pokok			
Fokus Keglatan/Penanggung Jawab Fokus			
Strategis			
\$788HW			

H.M.S. KABAN

MENTERI KEHUTANAN,